



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 273);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR
BELANJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS dan ASB Tahun Anggaran 2026.

Bagian Kedua
Standar Harga Satuan

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. SHS lainnya.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam :
 - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi/prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 6

Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan perubahan SHS.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Bagian Ketiga
Analisis Standar Belanja

Pasal 7

- (1) Muatan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
 - b. pengendali biaya (*cost driver*);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
 - e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
 - f. persamaan penghitungan ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ASB non Konstruksi; dan
 - b. ASB Konstruksi.
- (3) ASB non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan faktor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan pengendali biaya yang menunjukkan besarnya perubahan belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan pengendali biaya yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel dari suatu aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan batasan pengendali biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/kofisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA SKPD.

- (6) Persamaan penghitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 9

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA SKPD berpedoman pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Perangkat Daerah dapat menambahkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi volume/kofisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH

Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Komponen Standar Harga Satuan selain yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan mengacu kepada peraturan perundangan lainnya yang sesuai.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi;
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
5. Satuan Biaya lainnya



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah terinci pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
1.1.1 Honorarium PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa KPA)			



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta	OB	1,040,000	<p>A. Ketentuan honorarium PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besaran honorarium didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) Besaran honorarium dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing. <p>B. Ketentuan honorarium PA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa PA dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2) Besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PA. 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa PA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). <p>C. Ketentuan honorarium Kuasa PA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa PA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) Besaran honorarium Kuasa PA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa PA 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta	OB	1,250,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,450,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	1,660,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OB	1,970,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	2,280,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	2,590,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	3,010,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	3,420,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	3,840,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	4,250,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	4,770,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	5,290,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	5,810,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6,330,000	
p. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7,370,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a. Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta	OB	1,010,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta	OB	1,210,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,410,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	1,610,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OB	1,910,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	2,210,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	2,520,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	2,920,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	3,320,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	3,720,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	4,130,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	4,630,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	5,130,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	5,640,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6,140,000	
p. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7,140,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – Unit SKPD)			
a. Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta	OB	400,000	Ketentuan Honorarium PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD : 1) Diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD 2) Besaran Honorarium didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD/ PPK-Unit SKPD
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta	OB	480,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta	OB	570,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	660,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	770,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	880,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	990,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	1,250,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,520,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,780,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	2,040,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	2,440,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	2,830,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	3,230,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	3,620,000	
p. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	4,420,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
a. Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta	OB	340,000	Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta	OB	420,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta	OB	500,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	570,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d.2,5 Miliar	OB	670,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	770,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	860,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	1,090,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	1,320,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,550,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,780,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	2,120,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	2,470,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	2,810,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	3,160,000	
p. Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun	OB	3,840,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
a. Nilai Pagu dana di atas s.d. Rp. 100 juta	OB	260,000	Kepala daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp.250 juta	OB	310,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 juta	OB	370,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	430,000	Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu kepada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. Rp. 1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	500,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	570,000	Dalam hal bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	640,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	810,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	980,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	1,150,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	1,330,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	1,580,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	1,840,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	2,090,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	2,350,000	
p. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	2,860,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TABEL 1.2
HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa			
1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	680,000	<p>Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/ Kuasa PA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ <i>e-purchasing</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.</p>
1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			<p>Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15</p>



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			(lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan jasa konstruksi terintegrasi). Anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
a. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	850,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	1,020,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	1,270,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	1,520,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	1,780,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	2,120,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	2,450,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OP	2,790,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	3,130,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
j. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	3,580,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d.500 Miliar	OP	4,030,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d.750 Miliar	OP	4,490,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp.750 Miliar s.d.1 Triliun	OP	4,940,000	
n. Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun	OP	5,560,000	
1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
a. Nilai Pagu dana di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	760,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	920,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	1,140,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	1,370,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	1,600,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	1,910,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d.50 Miliar	OP	2,210,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OP	2,520,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
i. Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	2,820,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	3,230,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OP	3,640,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OP	4,040,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp.750 Miliar s.d. Rp.1 Triliun	OP	4,450,000	
n. Nilai Pagu dana di atas diatas Rp.1 triliun	OP	5,010,000	
1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
a. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OP	480,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	600,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	720,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d.Rp.2,5 Miliar	OP	910,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	1,090,000	
f. Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	1,270,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	1,510,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
h. Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	1,750,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OP	1,990,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	2,230,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	2,560,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OP	2,880,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OP	3,200,000	
n. Nilai Pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OP	3,520,000	
o. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OP	3,960,000	
1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
a. Nilai Pagu dana di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	600,000	
b. Nilai Pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	720,000	
c. Nilai Pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	910,000	
d. Nilai Pagu dana di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	1,090,000	
e. Nilai Pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	1,270,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
f. Nilai Pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	1,510,000	
g. Nilai Pagu dana di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	1,750,000	
h. Nilai Pagu dana di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OP	1,990,000	
i. Nilai Pagu dana di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	2,230,000	
j. Nilai Pagu dana di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	2,560,000	
k. Nilai Pagu dana di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OP	2,880,000	
l. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d.750 Miliar	OP	3,200,000	
m. Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d.1 Triliun	OP	3,520,000	
n. Nilai Pagu dana di atas diatas Rp. 1 triliun	OP	3,960,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

**TABEL 1.3
HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
a. Kepala	OB	1,000,000	
b. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750,000	

1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
Pejabat Eselon III	3	4	5
Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.4

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberi honoarium adalah: a. Mempunyai keluaran (<i>output</i>) yang jelas; b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; 2) Antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
a. Pengarah	OB	1,500,000	
b. Penanggungjawab	OB	1,250,000	
c. Ketua	OB	1,000,000	
d. Wakil Ketua	OB	850,000	
e. Sekretaris	OB	750,000	
f. Anggota	OB	750,000	
1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
a. Pengarah	OB	750,000	
b. Penanggungjawab	OB	700,000	
c. Ketua	OB	650,000	
d. Wakil Ketua	OB	600,000	
e. Sekretaris	OB	500,000	
f. Anggota	OB	500,000	
1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
1.4.2.1 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000	
b. Anggota	OB	220,000	

1.5 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

1.5.1 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

1.5.2 HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN ATAU MAJALAH

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.5.3 HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI ATAU WEBSITE

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.5

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Website			
1.5.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
a. Penanggung Jawab	Oter	500,000	
b. Redaktur	Oter	400,000	
c. Penyunting/Editor	Oter	300,000	
d. Desain Grafis	Oter	180,000	
e. Fotografer	Oter	180,000	
f. Sekretariat	Oter	150,000	
1.5.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
a. Penanggung Jawab	Oter	400,000	
b. Redaktur	Oter	300,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
c. Penyunting/ Editor	Oter	250,000	
d. Desain Grafis	Oter	180,000	
e. Fotografer	Oter	180,000	
f. Sekretariat	Oter	150,000	
1.5.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website			
a. Penanggung Jawab	OB	500,000	
b. Redaktur	OB	450,000	
c. Editor	OB	400,000	
d. Web Admin	OB	350,000	
e. Web Developer	OB	300,000	
1.5.4 Honorarium Penulis Artikel			
a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200,000	
b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100,000	

1.6 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Tabel 1.6
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
1.6.1 Honorarium TAPD			
a. Pembina	OB	3,500,000	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
b. Pengarah	OB	3,000,000	
c. Ketua	OB	2,500,000	
d. Wakil Ketua	OB	2,000,000	
e. Sekretaris	OB	1,500,000	
f. Anggota	OB	1,300,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.2 Honorarium Sekretariat TAPD			
a. Ketua	OB	1,000,000	Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang
b. Sekretaris	OB	900,000	
c. Anggota	OB	600,000	

1.7 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1.7.1 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR & PEMBAWA ACARA

Honorarium narasumber atau pembahas dan moderator diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

1.7.2 HONORARIUM PANITIA

Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

TABEL 1.7

HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7 HonorariumNarasumber/ Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara, dan Panitia			
1.7.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas			



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000	<p>Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>b. Narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luar SKPD penyelenggara atau masyarakat, honorarium diberikan 100% - dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara, honorarium diberikan sebesar 50%.
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000	
c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,200,000	
d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1,000,000	
e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900,000	
1.7.2 Honorarium Moderator	OK	700,000	<p>Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau Moderator dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan /masyarakat</p>
1.7.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000	
1.7.4 Honorarium Panitia			
a. Penanggung jawab	OK	450,000	<p>Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan</p>
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
c. Sekretaris	OK	300,000	
d. Anggota	OK	300,000	



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

- 29 -

			<p>besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.</p> <p>Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.</p> <p>Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>
--	--	--	---

1.8 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberi gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**Tabel 1.8
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara			
1.8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1,800,000	Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8.2 Honorarium Beracara	OK	1,800,000	Honorarium beracara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberi gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

1.9 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium tenaga penyuluh atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Tabel 1.9

HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9 Honorarium Penyuluh Non PNS			
a. Lulusan SLTA	OB	2,100,000	Lulusan SLTA diberikan sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
b. Lulusan DI/ DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2,400,000	Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
c. Lulusan Sarjana	OB	2,600,000	Lulusan Sarjana diberikan paling banyak 124% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
d. Lulusan Master	OB	2,800,000	Lulusan Master diberikan paling banyak 133% dari upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara
e. Lulusan Doktor	OB	3,000,000	Lulusan Doktor diberikan paling banyak 150% upah minimum Kabupaten Bengkulu Utara



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

1.10 HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.10

HONORARIUM ROHANIWAN

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.10 Rohaniwan	OK	400,000	

1.11 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.11

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11 Honorarium Penyelenggara Ujian			
1.11.1 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000	
b. Pengawas Ujian	OH	240,000	
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000	
1.11.2 Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000	
b. Pengawas Ujian	OH	270,000	
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

1.12 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.12

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.12 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota			
1.12.1 Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten /Kota	Per butir soal	100,000	
1.12.2 Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
a. Telaah materi soal	Per butir soal	45,000	
b. Telaah bahasa soal	Per butir soal	20,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

1.13 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Tabel 1.13

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.13 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat			
1.13.1 Penceramah Diklat	Orang /Jam Pelajaran	1,000,000	Honorarium diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan diklat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; b. Berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; atau c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
1.13.2 Pengajar Diklat			
a. Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	Orang /Jam Pelajaran	300,000	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
b. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	Orang /Jam Pelajaran	200,000	Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.13.3 Penyusunan modul Diklat	Per Modul	5,000,000	Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).
1.13.4 Panitia penyelenggaraan kegiatan Diklat			
Lama Diklat s.d. 5 hari			Honorarium diberikan kepada panitia diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
a. Penanggung Jawab	OK	450,000	
- Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
- Sekretaris	OK	300,000	
- Anggota	OK	300,000	
b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari			
- Penanggung Jawab	OK	675,000	
- Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000	
- Sekretaris	OK	450,000	
- Anggota	OK	450,000	
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
- Penanggung Jawab	OK	900,000	
- Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000	
- Sekretaris	OK	600,000	
- Anggota	OK	600,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

Honorarium pengurus barang milik daerah terinci pada Tabel 1.14

Tabel 1.14

HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah			Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
a. Pengurus Barang Pengelola	OB	500,000	Pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang
b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450,000	Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang
c. Pengurus Barang Pengguna	OB	400,000	ASN yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang
d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350,000	Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang
e. Pengurus Barang Pembantu	OB	300,000	Jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan dalam Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya, yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah;
- b. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 3. pengumandahan (detasering);
 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 9. mengikuti pendidikan dan pelatihan
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
- d. Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- e. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- f. Tempat yang dituju adalah tempat atau Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- g. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
- h. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- i. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- k. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Non-Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Non-ASN adalah pelaksana perjalanan dinas selain Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan/ atau Anggota DPRD;
- m. Perjalanan Dinas Berlaku untuk ASN dan Non-ASN yang diundang dalam rangka kebutuhan koordinasi, konsultasi, dan asistensi termasuk berlaku untuk staf dari instansi vertikal lainnya yang diperbantukan ke pemerintah daerah seperti ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang keangkatannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.;
- n. Biaya Perjalanan Dinas PPPK dan/atau Non-ASN disetarakan dengan PNS sesuai dengan golongan atau basis pendidikan pada saat pengangkatan PPPK dan/atau Non-ASN;
- o. Komponen Biaya Perjalanan Dinas meliputi:
 1. Uang Harian
 2. Uang Representasi
 3. Biaya Penginapan
 4. Biaya Transport
- p. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
 1. Uang Harian
 2. Uang Representasi
 3. Biaya PenginapanSedangkan komponen biaya transportasi diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini..
- q. Komponen Biaya Penginapan dan Biaya Transport dipertanggungjawabkan secara riil (*at-cost*).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

- r. Komponen Uang Harian dan Uang Representasi dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- s. Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima lebih dari satu komponen biaya perjalanan dinas, baik dari sumber anggaran yang sama maupun dari sumber anggaran yang berbeda;
- t. Perhitungan terhadap komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Nomor q diatas dihitung secara per hari selama pelaksanaan perjalanan dinas;
- u. Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana lokasi pelaksanaan diklat/bimtek sama dengan tempat menginap namun tidak ditanggung oleh penyelenggara, pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian diklat
- v. Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek, dimana uang harian tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian berupa sub komponen uang saku sebesar uang harian diklat/bimtek, uang makan dan uang transport lokal perjalanan dinas biasa;
- w. Pemberian sub komponen uang saku Diklat/Bimtek sebagaimana dimaksud pada nomor u berlaku pada hari efektif pelaksanaan Diklat/Bimtek, sedangkan pada hari keberangkatan ke tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek atau hari kepulangan dari tempat pelaksanaan Diklat/Bimtek dapat diberikan sub komponen uang harian untuk perjalanan dinas biasa.

2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari tersebut meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- b. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2.1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Perjalanan Dinas Dalam Kota (PDDK) terbagi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1. perjalanan dinas dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam; dan
- 2. perjalanan dinas dalam kota kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) jam.

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam kota yang kurang dari atau



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

sama dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan prosentase terhadap uang harian perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, sebagai berikut:

Tabel 1.15

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BENGKULU
UTARA**

Uang Harian PDDK lebih dari 8 (delapan) jam	Prosentase Uang Harian PDDK Kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) jam		
	Orang/Hari	Uang Makan (Rp)	Uang Transport Lokal (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
100%	25.0%	40.0%	35.0%
Rp. 150,000	Rp. 37,500	Rp. 60,000	Rp. 52,500

Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kecamatan Enggano, untuk kondisi force majeure transportasi baik kapal laut maupun pesawat terbang dari Enggano ke Bengkulu Utara sehingga tidak dapat kembali ke Bengkulu Utara sesuai jadwal kepulangan perjalanan dinas, maka selama masa tunggu kepulangan ke Bengkulu Utara, pertanggungjawaban pengeluaran perjalanan dinas (penginapan dan transportasi Enggano-Bengkulu Utara) dilakukan secara at cost dengan melampirkan surat tugas dan bukti pengeluaran riil penginapan dan transportasi dan tetap diberikan uang harian.

Yang dimaksud dengan kondisi force majeure transportasi dari Enggano ke Bengkulu Utara ini adalah kejadian-kejadian alam seperti hujan badai, gempa, atau bencana alam yang secara langsung mempengaruhi moda transportasi kapal laut dan pesawat terbang rute Enggano-Bengkulu Utara sehingga tidak dapat beroperasi.

2.1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.16

Tabel 1.16

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	Rp360,000	Rp140,000	Rp110,000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
3	Riau	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Jambi	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
8	Lampung	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
9	Bengkulu	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410,000	Rp160,000	Rp120,000
11	Banten	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
12	Jawa Barat	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
13	DKI Jakarta	OH	Rp530,000	Rp210,000	Rp160,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp420,000	Rp170,000	Rp130,000
16	Jawa Timur	OH	Rp410,000	Rp160,000	Rp120,000
17	Bali	OH	Rp480,000	Rp190,000	Rp140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440,000	Rp180,000	Rp130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360,000	Rp140,000	Rp110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
26	Gorontalo	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410,000	Rp160,000	Rp120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370,000	Rp150,000	Rp110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
31	Maluku	OH	Rp380,000	Rp150,000	Rp110,000
32	Maluku Utara	OH	Rp430,000	Rp170,000	Rp130,000
33	Papua	OH	Rp580,000	Rp230,000	Rp170,000
34	Papua Barat	OH	Rp480,000	Rp190,000	Rp140,000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp480,000	Rp190,000	Rp140,000
36	Papua Tengah	OH	Rp580,000	Rp230,000	Rp170,000
37	Papua Selatan	OH	Rp580,000	Rp230,000	Rp170,000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp580,000	Rp230,000	Rp170,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

2.2 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan/Anggota DPR/DPRD, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang Representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips potes, dan tips pengemudi.
- Uang Representasi diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.17.

TABEL 1.17

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Ketua/Anggota DPRD	OH	Rp250,000	Rp125,000
2	Pejabat Eselon I	OH	Rp200,000	Rp100,000
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150,000	Rp75,000

2.3 BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran.
- Bentuk pertanggungjawaban biaya penginapan belanja didasarkan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban/pengeluaran riil (at-cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.18.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Tabel 1.18

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan (OH)	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD /Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatra Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatra Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

No	Provinsi	Satuan (OH)	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD /Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan koordinatif serta melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

3.1 PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (Empat) jenis yaitu :

1. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (Satu) malam, Makan 3 (Tiga) kali, Rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

- untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 1 (Satu) orang dan
- untuk pejabat eselon II ke bawah, akomodasi 1 (Satu) kamar untuk 2 (Dua) orang



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 44 -

2. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (Delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (Dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (Lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (Satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (Satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (Dua Belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makanan 2 (Dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (Tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

c. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel 1.19 dan 1.20 berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tabel 1.19

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

No	Provinsi	Satuan (OP)	Halfday (Rp.)	Fullday (Rp.)	Fullboard (Rp.)	Residence (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	453,000	663,000	1,732,000	1,116,000
2	Sumatera Utara	OP	451,000	675,000	1,350,000	1,126,000
3	Riau	OP	319,000	582,000	1,229,000	901,000
4	Kepulauan Riau	OP	471,000	634,000	1,484,000	1,105,000
5	Jambi	OP	465,000	595,000	1,538,000	1,060,000
6	Sumatera Barat	OP	351,000	502,000	1,492,000	853,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

No	Provinsi	Satuan (OP)	Halfday (Rp.)	Fullday (Rp.)	Fullboard (Rp.)	Residence (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Sumatera Selatan	OP	489,000	718,000	1,448,000	1,207,000
8	Lampung	OP	452,000	577,000	1,200,000	1,029,000
9	Bengkulu	OP	383,000	538,000	1,262,000	921,000
10	Bangka Belitung	OP	555,000	714,000	1,632,000	1,269,000
11	Banten	OP	678,000	930,000	1,752,000	1,608,000
12	Jawa Barat	OP	567,000	799,000	1,914,000	1,366,000
13	DKI Jakarta	OP	760,000	993,000	2,257,000	1,753,000
14	Jawa Tengah	OP	426,000	738,000	1,576,000	1,164,000
15	DI Yogyakarta	OP	458,000	607,000	1,470,000	1,065,000
16	Jawa Timur	OP	442,000	710,000	2,159,000	1,152,000
17	Bali	OP	737,000	907,000	2,523,000	1,644,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503,000	800,000	1,413,000	1,303,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	642,000	1,046,000	2,013,000	1,688,000
20	Kalimantan Barat	OP	462,000	617,000	1,247,000	1,079,000
21	Kalimantan Tengah	OP	455,000	679,000	2,092,200	1,134,000
22	Kalimantan Selatan	OP	380,000	545,000	1,340,900	925,000
23	Kalimantan Timur	OP	423,000	750,000	1,250,000	1,173,000
24	Kalimantan Utara	OP	393,000	722,700	1,763,300	1,115,700
25	Sulawesi Utara	OP	490,000	620,000	1,250,000	1,110,000
26	Goron Talo	OP	390,000	562,000	2,296,800	952,000
27	Sulawesi Barat	OP	390,000	574,000	1,301,000	964,000
28	Sulawesi Selatan	OP	403,000	583,000	2,218,000	986,000
29	Sulawesi Tengah	OP	440,000	652,000	1,672,000	1,092,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510,000	552,000	1,335,000	949,000
31	Maluku	OP	463,000	638,000	1,881,000	1,101,000
32	Maluku Utara	OP	575,000	693,000	1,220,000	1,268,000
33	Papua	OP	482,000	768,000	2,063,000	1,250,000
34	Papua Barat	OP	503,000	728,000	1,952,000	1,231,000
35	Papua Barat Daya	OP	503,000	728,000	1,952,000	1,231,000
36	Papua Tengah	OP	482,000	768,000	2,063,000	1,250,000
37	Papua Selatan	OP	709,000	1,129,000	3,033,000	1,838,000
38	Papua Pegunungan	OP	739,000	1,070,000	2,869,000	1,809,000

Tabel 1.20

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II KEBAWAH**

No	Provinsi	Satuan (OP)	Halfday (Rp.)	Fullday (Rp.)	Fullboard (Rp.)	Residence (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OP	413,000	575,000	1,075,000	988,000
2	Sumatera Utara	OP	411,000	511,000	1,011,000	922,000
3	Riau	OP	279,000	432,000	1,084,000	711,000
4	Kepulauan Riau	OP	431,000	531,000	1,170,000	962,000
5	Jambi	OP	425,000	525,000	1,298,000	950,000
6	Sumatera Barat	OP	311,000	432,000	987,000	743,000
7	Sumatera Selatan	OP	391,000	502,000	1,030,000	893,000
8	Lampung	OP	421,000	512,000	950,000	933,000
9	Bengkulu	OP	343,000	468,000	1,062,000	811,000
10	Bangka Belitung	OP	509,000	582,000	1,115,000	1,031,000
11	Banten	OP	542,000	632,000	1,201,000	1,134,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
(1)	(2)	(OP)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
12	Jawa Barat	OP	474,000	692,000	1,110,000	1,166,000
13	DKI Jakarta	OP	542,000	667,000	1,347,000	1,209,000
14	Jawa Tengah	OP	303,000	474,000	919,000	777,000
15	DI Yogyakarta	OP	332,000	507,000	1,204,000	839,000
16	Jawa Timur	OP	398,000	623,000	1,784,000	1,021,000
17	Bali	OP	488,000	652,000	1,569,000	1,140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488,000	713,000	1,213,000	1,201,000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463,000	602,000	1,294,000	1,065,000
20	Kalimantan Barat	OP	422,000	547,000	1,047,000	969,000
21	Kalimantan Tengah	OP	415,000	609,000	1,902,000	1,024,000
22	Kalimantan Selatan	OP	340,000	475,000	1,219,000	815,000
23	Kalimantan Timur	OP	324,000	478,000	1,050,000	802,000
24	Kalimantan Utara	OP	373,000	657,000	1,603,000	1,030,000
25	Sulawesi Utara	OP	450,000	550,000	1,050,000	1,000,000
26	Gorontalo	OP	350,000	492,000	2,088,000	842,000
27	Sulawesi Barat	OP	350,000	504,000	1,101,000	854,000
28	Sulawesi Selatan	OP	363,000	513,000	1,574,000	876,000
29	Sulawesi Tengah	OP	400,000	582,000	1,520,000	982,000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464,000	604,000	1,171,000	1,068,000
31	Maluku	OP	423,000	568,000	1,710,000	991,000
32	Maluku Utara	OP	523,000	623,000	1,050,000	1,146,000
33	Papua	OP	442,000	698,000	1,863,000	1,140,000
34	Papua Barat	OP	463,000	658,000	1,752,000	1,121,000
35	Papua Barat Daya	OP	463,000	658,000	1,752,000	1,121,000
36	Papua Tengah	OP	442,000	698,000	1,863,000	1,140,000
37	Papua Selatan	OP	650,000	1,026,000	2,739,000	1,676,000
38	Papua Pegunungan	OP	650,000	1,026,000	2,739,000	1,676,000

3.2 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, Kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel berikut. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari belum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Standar Harga Satuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

Tabel 1.21

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No	Provinsi	Satuan (OH)	Fullboard Luar Kota Rp.	Fullboard Dalam Kota Rp.	Fullday/ Halfday Dalam Kota Rp.	Residence Dalam Kota Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
2	Sumatera Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
3	Riau	OH	130,000	130,000	85,000	130,000
4	Kepulauan Riau	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
5	Jambi	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
6	Sumatra Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
7	Sumatra Selatan	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
8	Lampung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
9	Bengkulu	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
10	Bangka Belitung	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
11	Banten	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
12	Jawa Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
13	DKI Jakarta	OH	180,000	180,000	130,000	180,000
14	Jawa Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
15	DI Yogyakarta	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
16	Jawa Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
17	Bali	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000	140,000	100,000	140,000
20	Kalimantan Barat	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
21	Kalimantan Tengah	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
22	Kalimantan Selatan	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
23	Kalimantan Timur	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
24	Kalimantan Utara	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
25	Sulawesi Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
26	Goron Talo	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
27	Sulawesi Barat	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	150,000	150,000	105,000	150,000
29	Sulawesi Tengah	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 48 -

No	Provinsi	Satuan (OH)	Fullboard Luar Kota Rp.	Fullboard Dalam Kota Rp.	Fullday/ Halfday Dalam Kota Rp.	Residence Dalam Kota Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	Maluku	OH	120,000	120,000	85,000	120,000
32	Maluku Utara	OH	130,000	130,000	95,000	130,000
33	Papua	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
34	Papua Barat	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
35	Papua Barat Daya	OH	160,000	160,000	115,000	160,000
36	Papua Tengah	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
37	Papua Selatan	OH	200,000	200,000	140,000	200,000
38	Papua Pegunungan	OH	200,000	200,000	140,000	200,000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS KABUPATEN BENGKULU UTARA

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Standar satuan harga Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pengadaan Kendaraan Dinas berbasis listrik untuk memenuhi INPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

TABEL 1.22

STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS KABUPATEN BENGKULU UTARA

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	879,913,000	
Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	835,112,000	
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4:	Unit		



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

- 49 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Pick up	Unit	313,527,000	
b. Minibus	Unit	387,510,000	
c. Double gardan	Unit	576,868,000	
Kendaraan Operasional Bus:			
a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498,810,000	
b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768,820,000	
c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,268,200,000	
Kendaraan Operasional Kantor dan/ Lapangan Roda 2 (dua):			
a. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	41,253,000	
b. Kendaraan Lapangan	Unit	49,325,000	

TABEL 1.23

**STANDAR BIAYA PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	966,804,000	
Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	746,110,000	
Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430,080,000	
Kendaraan Roda Dua	Unit	28,000,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

5. SATUAN BIAYA LAINNYA

**5.1 SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/
LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN / PERIKATAN**

5.1.1 JASA TENAGA KESEHATAN NON ASN

Tabel 1.24

JASA TENAGA KESEHATAN NON ASN

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.1 Jasa Tenaga Kesehatan Non ASN			Ketentuan honorarium: - Permendagri 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 50 - Pegawai BLUD dapat diberikan renumerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan - Mengacu pada KepMenkes HK 01.07 /Menkes /545/2019 tentang Besaran Tunjangan Dokter Spesialis dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis
A. Tenaga Medis Non ASN			
1. Dokter Umum / Dokter Gigi	OB	4,000,000	- Khusus untuk dokter umum/gigi pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
2. Dokter Spesialis	OB	23,760,000	- Khusus untuk dokter spesialis pada RSUD yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
B. Tenaga Keperawatan Non ASN			
Perawat/ Bidan	OB	3,300,000	Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
C. Tenaga Kefarmasian Non ASN			
Apoteker/ Asisten Apoteker	OB	3,300,000	Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
D. Tenaga Kesehatan Masyarakat Non ASN			
Ahli Kesehatan Masyarakat	OB	3,300,000	- Berlaku untuk Epidemiolog / Entomolog / Mikrobiolog / Penyuluh Kesehatan / Administrator Kesehatan / Sanitarian - Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
E. Tenaga Gizi Non ASN			
Nutrisisionis/ Dietisien	OB	3,300,000	Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
F. Tenaga Keterampilan Fisik Non ASN			
Fisioterapis/ Okupasiterapis /Terapis Wicara	OB	3,300,000	Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
G. Tenaga Keteknisian Medis Non ASN			
Teknisi Medis	OB	3,300,000	- Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analisis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, Teknisi Transfusi Dan Perekam Medis - Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja
H. Tenaga Laboratorium Non ASN			
Tenaga Penyelia Mutu, Tenaga Analisis dan Petugas Sampling, Tenaga Penyelia Teknis, Penyelia Analisis	OB	2,200,000	Dalam 1 (satu) bulan kalender dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

**5.1.2 JASA TENAGA AJUDAN DAN SOPIR YANG DITUGASKAN KEPADA BUPATI,
WAKIL BUPATI, DAN PIMPINAN DPRD**

Tabel 1.25

**JASA TENAGA AJUDAN DAN SOPIR YANG DITUGASKAN KEPADA BUPATI, WAKIL
BUPATI, DAN PIMPINAN DPRD**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.2 Jasa Tenaga Ajudan Dan Sopir Yang Ditugaskan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Dan Pimpinan DPRD			
A. Ajudan			
1. Ajudan Bupati/Istri Bupati	OB	3,800,000	
2. Ajudan Wakil Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	3,500,000	
3. Ajudan Pimpinan DPRD	OB	3,500,000	
B. Sopir			
1. Sopir Bupati/Istri Bupati	OB	3,000,000	
2. Sopir Wakil Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2,500,000	
3. Sopir Pimpinan DPRD/Istri Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah/Istri Sekretaris Daerah	OB	2,500,000	

5.1.3 JASA TENAGA KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN PENGEMUDI

Tabel 1.26

JASA TENAGA KEBERSIHAN, KEMANAN DAN PENGEMUDI

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.3 Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Pengemudi			
1. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2,811,000	Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025
2. Petugas Keamanan	OB	3,093,000	
3. Petugas Pengemudi	OB	2,400,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

5.1.4 JASA TENAGA AHLI/PROFESIONAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAH

Jasa Tenaga ahli/Profesional adalah suatu lembaga/perguruan tinggi/ instansi/ perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan kompetensinya pada bidangnya masing-masing.

Tabel 1.27

JASA TENAGA AHLI/PROFESIONAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAH

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.4 Jasa Tenaga Ahli/ Profesional dalam Kegiatan Pemerintah			
A. Kualifikasi Strata 1 (S1)	OJ	50,000	Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun.
B. Kualifikasi Strata 2 (S2)	OJ	75,000	Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per tahun.
C. Kualifikasi Strata 3 (S3)	OJ	100,000	Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta) per tahun.
D. Kualifikasi Guru Besar	OJ	125,000	Maksimal 8 (delapan) jam perhari, 6 (enam) hari kerja perbulan dan total penerimaan maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) per tahun.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

5.1.5 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR ASN DAN NON ASN

Tabel 1.28
HONORARIUM LEMBUR ASN DAN NON ASN

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1.5 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PEGAWAI ASN Dan Non ASN			Kerja lembur hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang sifatnya penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas. Uang lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 2 (dua) jam penuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.39 Tahun 2024
A. Uang Lembur Pegawai ASN			
1. ASN Gol I	OJ	18,000	
2. ASN Gol II	OJ	24,000	
3. ASN Gol III	OJ	30,000	
4. ASN Gol IV	OJ	36,000	
B. Uang Makan Lembur Pegawai ASN			
1. ASN Gol I	OH	35,000	
2. ASN Gol II	OH	35,000	
3. ASN Gol III	OH	37,000	
4. ASN Gol IV	OH	41,000	
C. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pegawai Non ASN			
1. Pegawai Non ASN		20,000	
a. Uang Lembur	OJ	20,000	
b. Uang Makan	OH	31,000	
2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti			
a. Uang Lembur	OJ	13,000	
b. Uang Makan	OH	30,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

5.2 SATUAN BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN

Tabel 1.29

BIAYA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Per hari	1,500,000	
2. Sewa tenda			
a. Tenda Sarnafil 3x3	Per hari	1,200,000	
b. Tenda Sarnafil 5x5	Per hari	1,500,000	
c. Tenda Konvensional 3x3	Per hari	500,000	
d. Tenda Konvensional 4x6	Per hari	600,000	
e. Tenda Konvensional 6x6	Per hari	700,000	
f. Panggung Rigging Full set 12x12	Per hari	30,000,000	
g. Panggung Rigging Full set 8x9	Per hari	15,000,000	
h. WC portable	Per hari	5,000,000	
i. Aksesoris panggung	Per hari	5,000,000	

5.3 SATUAN BIAYA PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN JURNAL/SURAT KABAR

Tabel 1.30

BIAYA PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN JURNAL/SURAT KABAR

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor. Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan dengan mempertimbangkan prinsip efisien dan efektif.
1. Perangkat Derah Tipe A	Per Tahun	15,000,000	Nilai maksimal kecuali Sekretariat Daerah,



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 56 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Perangkat Daerah Tipe B	Per Tahun	13,500,000	Sekretariat DPRD, BKAD, Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
3. Perangkat Daerah Tipe C	Per Tahun	12,000,000	
4. Kecamatan	Per Tahun	12,000,000	
5. UPTD	Per Tahun	5,000,000	Kecuali UPTD RSUD Arga Makmur
6. ATK Peserta Pelatihan	Per Tahun	25,000	Selain diklat struktural.
B. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen / Administrasi Tender			Digunakan untuk mencatat belanja dokumen/ administrasi tender.
1. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan Nilai Pagu dana di atas s.d.200 Juta dan/ atau Jenis pengadaan Jasa Konsultansi dengan Nilai Pagu dana di atas s.d.100 Juta	Per Paket Pekerjaan	250,000	
2. Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan Nilai Pagu dana di atas diatas 200 Juta dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi diatas 100 Juta	Per Paket Pekerjaan	500,000	
C. Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar			



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perangkat Daerah Tipe A	Eksemplar/ Hari	6	Maksimal kecuali Setdakab, Bappelitbangda, Sekretariat DPRD, BKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
2. Perangkat Daerah Tipe B	Eksemplar/ Hari	5	
3. Perangkat Daerah Tipe C	Eksemplar/ Hari	4	
4. Kelurahan / UPTD	Eksemplar/ Hari	1	Kecuali Rumah Sakit Umum Arga Makmur

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 58 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR & PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional diberikan kepada pakar, praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Besaran Honorarium narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara profesional terinci pada Tabel 2.1.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

TABEL 2.1

**HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
PROFESIONAL**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara Profesional			
2.1.1 Honorarium Narasumber / Pembahas Profesional	OJ	1,500,000	Khusus honorarium narasumber/ pembahas profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2.1.2 Honorarium Moderator Profesional	OK	1,000,000	Khusus honorarium moderator khusus/ profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2.1.3 Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750,000	Khusus honorarium pembawa acara khusus/ profesional, besaran pada kolom 3 (tiga) bersifat sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

- c. Pembiayaan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban *at cost*).

Tabel 2.2

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	13,285,000	7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	7,412,000	3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	7,519,000	4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2,407,000	1,583,000
5	Jakarta	Banjar Masin	5,252,000	2,995,000
6	Jakarta	Batam	4,867,000	2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	4,364,000	2,621,000
8	Jakarta	Biak	14,065,000	7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	5,305,000	3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	7,231,000	4,824,000
11	Jakarta	Jambi	4,065,000	2,460,000
12	Jakarta	Jaya pura	14,568,000	8,193,000
13	Jakarta	Jogyakarta	4,107,000	2,268,000
14	Jakarta	Kendari	7,658,000	4,182,000
15	Jakarta	Kupang	9,413,000	5,081,000
16	Jakarta	Makasar	7,444,000	3,829,000
17	Jakarta	Malang	4,599,000	2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	7,295,000	4,867,000
19	Jakarta	Manado	10,824,000	5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	16,226,000	10,824,000
21	Jakarta	Mataram	5,316,000	3,230,000
22	Jakarta	Medan	7,252,000	3,808,000
23	Jakarta	Padang	5,530,000	2,952,000
24	Jakarta	PalangKaraya	4,984,000	2,984,000
25	Jakarta	Palembang	3,861,000	2,268,000
26	Jakarta	Palu	9,348,000	5,113,000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3,412,000	2,139,000
28	Jakarta	PekanBaru	5,583,000	3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	4,353,000	2,781,000
30	Jakarta	Semarang	3,861,000	2,182,000
31	Jakarta	Solo	3,861,000	2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	5,466,000	2,674,000
33	Jakarta	Ternate	10,001,000	6,664,000
34	Jakarta	Timika	13,830,000	7,487,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Jakarta	Tanjung Selor	7,424,000	4,057,000
36	Ambon	Denpasar	8,054,000	4,471,000
37	Ambon	Jaya pura	7,434,000	4,161,000
38	Ambon	Kendari	4,824,000	2,856,000
39	Ambon	Makasar	6,022,000	3,455,000
40	Ambon	Manokwari	5,177,000	3,027,000
41	Ambon	Palu	6,140,000	3,508,000
42	Ambon	Sorong	3,637,000	2,257,000
43	Ambon	Surabaya	8,803,000	4,845,000
44	Ambon	Ternate	4,022,000	2,449,000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12,739,000	6,749,000
46	Balikpapan	Batam	10,354,000	5,305,000
47	Balikpapan	Denpasar	10,739,000	5,648,000
48	Balikpapan	Jaya pura	19,071,000	10,086,000
49	Balikpapan	Jokjakarta	9,669,000	4,749,000
50	Balikpapan	Makasar	12,664,000	6,150,000
51	Balikpapan	Manado	15,702,000	7,295,000
52	Balikpapan	Medan	12,493,000	6,140,000
53	Balikpapan	Padang	10,942,000	5,369,000
54	Balikpapan	Palembang	9,445,000	4,749,000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10,996,000	5,423,000
56	Balikpapan	Semarang	9,445,000	4,674,000
57	Balikpapan	Solo	9,445,000	4,813,000
58	Balikpapan	Surabaya	10,889,000	5,113,000
59	Balikpapan	Timika	18,408,000	9,445,000
60	Banda Aceh	Denpasar	10,835,000	6,279,000
61	Banda Aceh	Jaya pura	19,167,000	10,717,000
62	Banda Aceh	Jokjakarta	9,765,000	5,380,000
63	Banda Aceh	Makasar	12,760,000	6,781,000
64	Banda Aceh	Manado	15,798,000	7,926,000
65	Banda Aceh	Pontianak	9,990,000	5,840,000
66	Banda Aceh	Semarang	9,530,000	5,305,000
67	Banda Aceh	Solo	9,530,000	5,444,000
68	Banda Aceh	Surabaya	10,985,000	5,744,000
69	Banda Aceh	Timika	18,504,000	10,076,000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8,129,000	4,129,000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8,225,000	4,760,000
72	Bandar Lampung	Banjar Masin	6,193,000	3,412,000
73	Bandar Lampung	Batam	5,840,000	3,316,000
74	Bandar Lampung	Biak	14,119,000	7,487,000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6,236,000	3,647,000
76	Bandar Lampung	Jaya pura	14,568,000	8,097,000
77	Bandar Lampung	Jogjakarta	5,155,000	2,760,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78	Bandar Lampung	Kendari	8,354,000	4,482,000
79	Bandar Lampung	Makasar	8,161,000	4,161,000
80	Bandar Lampung	Malang	5,594,000	3,134,000
81	Bandar Lampung	Manado	11,199,000	5,305,000
82	Bandar Lampung	Mataram	6,246,000	3,626,000
83	Bandar Lampung	Medan	7,979,000	4,150,000
84	Bandar Lampung	Padang	6,439,000	3,380,000
85	Bandar Lampung	PalangKaraya	5,947,000	3,401,000
86	Bandar Lampung	Palembang	4,931,000	2,760,000
87	Bandar Lampung	PekanBaru	6,482,000	3,433,000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5,380,000	3,220,000
89	Bandar Lampung	Semarang	4,931,000	2,685,000
90	Bandar Lampung	Solo	4,931,000	2,824,000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6,386,000	3,123,000
92	Bandar Lampung	Timika	13,905,000	7,455,000
93	Bandung	Batam	6,289,000	3,583,000
94	Bandung	Denpasar	5,626,000	3,252,000
95	Bandung	Jambi	5,006,000	2,941,000
96	Bandung	Yogyakarta	3,369,000	2,129,000
97	Bandung	Padang	6,129,000	3,508,000
98	Bandung	Palembang	4,385,000	2,631,000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4,599,000	2,738,000
100	Bandung	PekanBaru	6,525,000	3,701,000
101	Bandung	Semarang	3,027,000	1,957,000
102	Bandung	Solo	3,647,000	2,268,000
103	Bandung	Surabaya	4,824,000	2,856,000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4,439,000	2,663,000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10,792,000	6,022,000
106	Banjarmasin	Batam	8,407,000	4,578,000
107	Banjarmasin	Biak	16,686,000	8,749,000
108	Banjarmasin	Denpasar	8,792,000	4,920,000
109	Banjarmasin	Jaya pura	17,135,000	9,359,000
110	Banjarmasin	Jokjakarta	7,723,000	4,022,000
111	Banjarmasin	Medan	10,546,000	5,412,000
112	Banjarmasin	Padang	9,006,000	4,642,000
113	Banjarmasin	Palembang	7,498,000	4,022,000
114	Banjarmasin	PekanBaru	9,049,000	4,696,000
115	Banjarmasin	Semarang	7,498,000	3,958,000
116	Banjarmasin	Solo	7,498,000	4,097,000
117	Banjarmasin	Surabaya	8,942,000	4,385,000
118	Banjarmasin	Timika	16,472,000	8,717,000
119	Batam	Banda Aceh	10,439,000	5,936,000
120	Batam	Denpasar	8,450,000	4,824,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 63 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
121	Batam	Jaya pura	16,782,000	9,263,000
122	Batam	Jokjakarta	7,370,000	3,936,000
123	Batam	Makasar	10,375,000	5,337,000
124	Batam	Manado	13,413,000	6,482,000
125	Batam	Medan	10,193,000	5,316,000
126	Batam	Padang	8,653,000	4,546,000
127	Batam	Palembang	7,145,000	3,936,000
128	Batam	PekanBaru	8,707,000	4,599,000
129	Batam	Pontianak	7,594,000	4,396,000
130	Batam	Semarang	7,145,000	3,861,000
131	Batam	Solo	7,145,000	4,000,000
132	Batam	Surabaya	8,600,000	4,300,000
133	Batam	Timika	16,119,000	8,621,000
134	Bengkulu	Palembang	2,899,000	1,893,000
135	Biak	Balikpapan	18,622,000	9,477,000
136	Biak	Banda Aceh	18,718,000	10,108,000
137	Biak	Batam	16,333,000	8,664,000
138	Biak	Denpasar	16,729,000	8,995,000
139	Biak	Jaya pura	3,615,000	2,321,000
140	Biak	Jokjakarta	15,648,000	8,108,000
141	Biak	Manado	11,734,000	6,353,000
142	Biak	Medan	18,472,000	9,498,000
143	Biak	padang	16,932,000	8,728,000
144	Biak	Palembang	15,424,000	8,108,000
145	Biak	PekanBaru	16,985,000	8,781,000
146	Biak	Pontianak	15,873,000	8,568,000
147	Biak	Surabaya	12,782,000	7,081,000
148	Biak	Timika	5,808,000	3,444,000
149	Denpasar	Jaya pura	11,680,000	6,845,000
150	Denpasar	Kupang	5,091,000	2,952,000
151	Denpasar	Makasar	4,182,000	2,631,000
152	Denpasar	Manado	7,851,000	4,278,000
153	Denpasar	Mataram	1,840,000	1,390,000
154	Denpasar	Medan	10,589,000	5,658,000
155	Denpasar	Padang	9,049,000	4,888,000
156	Denpasar	PalangKaraya	8,557,000	4,909,000
157	Denpasar	Palembang	7,541,000	4,278,000
158	Denpasar	PekanBaru	9,092,000	4,942,000
159	Denpasar	Pontianak	7,990,000	4,738,000
160	Denpasar	Timika	10,140,000	6,129,000
161	Jambi	Balikpapan	7,733,000	4,407,000
162	Jambi	Banjar Masin	7,690,000	4,193,000
163	Jambi	Denpasar	7,733,000	4,439,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164	Jambi	Jokjakarta	6,653,000	3,551,000
165	Jambi	Kupang	11,434,000	6,075,000
166	Jambi	Makasar	9,659,000	4,952,000
167	Jambi	Malang	7,091,000	3,925,000
168	Jambi	Manado	12,707,000	6,097,000
169	Jambi	PalangKaraya	7,444,000	4,193,000
170	Jambi	Pontianak	6,878,000	4,011,000
171	Jambi	Semarang	6,428,000	3,476,000
172	Jambi	Solo	6,428,000	3,615,000
173	Jambi	Surabaya	7,883,000	3,915,000
174	Jayapura	Jokjakarta	13,274,000	7,690,000
175	Jayapura	Manado	22,109,000	11,263,000
176	Jayapura	Medan	18,932,000	10,097,000
177	Jayapura	Padang	17,381,000	9,327,000
178	Jayapura	Palembang	15,873,000	8,717,000
179	Jayapura	PekanBaru	17,435,000	9,380,000
180	Jayapura	Pontianak	16,322,000	9,177,000
181	Jayapura	Timika	3,615,000	2,289,000
182	Jogjakarta	Denpasar	3,861,000	2,481,000
183	Jogjakarta	Makasar	6,525,000	3,893,000
184	Jogjakarta	Manado	10,536,000	5,722,000
185	Jogjakarta	Medan	9,519,000	4,770,000
186	Jogjakarta	Padang	7,969,000	4,000,000
187	Jogjakarta	Palembang	6,460,000	3,380,000
188	Jogjakarta	PekanBaru	8,022,000	4,054,000
189	Jogjakarta	Pontianak	6,910,000	3,840,000
190	Jogjakarta	Timika	11,894,000	7,038,000
191	Kendari	Banda Aceh	12,953,000	7,102,000
192	Kendari	Batam	10,568,000	5,658,000
193	Kendari	Denpasar	5,455,000	3,273,000
194	Kendari	Jokjakarta	8,129,000	4,706,000
195	Kendari	padang	11,167,000	5,722,000
196	Kendari	Palembang	9,659,000	5,102,000
197	Kendari	PekanBaru	11,220,000	5,776,000
198	Kendari	Semarang	9,659,000	5,027,000
199	Kendari	Solo	9,659,000	5,166,000
200	Kendari	Surabaya	11,103,000	5,466,000
201	Kendari	Timika	18,633,000	9,798,000
202	Kupang	Jaya pura	14,386,000	8,108,000
203	Kupang	Jokjakarta	7,348,000	4,182,000
204	Kupang	Makasar	7,637,000	4,311,000
205	Kupang	Manado	11,648,000	6,140,000
206	Kupang	Surabaya	6,749,000	3,722,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 65 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
207	Makassar	Biak	8,493,000	4,931,000
208	Makassar	Jaya pura	10,193,000	5,787,000
209	Makassar	Kendari	2,663,000	1,786,000
210	Makassar	Manado	5,327,000	2,909,000
211	Makassar	Timika	11,723,000	6,567,000
212	Malang	Balikpapan	10,108,000	5,134,000
213	Malang	Banda Aceh	10,204,000	5,765,000
214	Malang	Banjar Masin	8,161,000	4,407,000
215	Malang	Batam	7,819,000	4,311,000
216	Malang	Biak	16,087,000	8,482,000
217	Malang	Jaya pura	16,536,000	9,092,000
218	Malang	Kendari	10,322,000	5,487,000
219	Malang	Makasar	10,129,000	5,166,000
220	Malang	Manado	13,167,000	6,311,000
221	Malang	Medan	9,958,000	5,145,000
222	Malang	Padang	8,418,000	4,385,000
223	Malang	PalangKaraya	7,915,000	4,407,000
224	Malang	Palembang	6,899,000	3,765,000
225	Malang	PekanBaru	8,461,000	4,439,000
226	Malang	Timika	15,873,000	8,461,000
227	Manado	Medan	15,552,000	7,316,000
228	Manado	Padang	14,012,000	6,546,000
229	Manado	Palembang	12,504,000	5,926,000
230	Manado	PekanBaru	14,055,000	6,599,000
231	Manado	Pontianak	12,953,000	6,396,000
232	Manado	Semarang	12,504,000	5,851,000
233	Manado	Solo	12,504,000	5,990,000
234	Manado	Surabaya	9,937,000	5,262,000
235	Manado	Timika	16,183,000	8,995,000
236	Mataram	Balikpapan	10,750,000	5,615,000
237	Mataram	Banda Aceh	10,846,000	6,246,000
238	Mataram	Banjar Masin	8,803,000	4,888,000
239	Mataram	Batam	8,461,000	4,803,000
240	Mataram	Biak	11,552,000	6,546,000
241	Mataram	Jaya pura	13,092,000	7,327,000
242	Mataram	Jokjakarta	4,417,000	2,781,000
243	Mataram	Makasar	4,717,000	2,909,000
244	Mataram	Manado	8,717,000	4,738,000
245	Mataram	Medan	10,600,000	5,637,000
246	Mataram	Padang	9,060,000	4,867,000
247	Mataram	Palembang	7,551,000	4,246,000
248	Mataram	PekanBaru	9,102,000	4,909,000
249	Mataram	Pontianak	8,001,000	4,706,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 66 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
250	Mataram	Surabaya	3,829,000	2,321,000
251	Medan	Banda Aceh	3,466,000	2,193,000
252	Medan	Makasar	12,514,000	6,172,000
253	Medan	Pontianak	9,733,000	5,230,000
254	Medan	Semarang	9,284,000	4,696,000
255	Medan	Solo	9,284,000	4,835,000
256	Medan	Surabaya	10,739,000	5,134,000
257	Medan	Timika	18,258,000	9,455,000
258	Padang	Makasar	10,974,000	5,402,000
259	Padang	Pontianak	8,193,000	4,460,000
260	Padang	Semarang	7,744,000	3,925,000
261	Padang	Solo	7,744,000	4,065,000
262	Padang	Surabaya	9,199,000	4,364,000
263	Padang	Timika	16,718,000	8,685,000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10,546,000	6,022,000
265	Palangkaraya	Batam	8,161,000	4,578,000
266	Palangkaraya	Jokjakarta	7,477,000	4,022,000
267	Palangkaraya	Mataram	8,557,000	4,888,000
268	Palangkaraya	Medan	10,300,000	5,412,000
269	Palangkaraya	Padang	8,760,000	4,642,000
270	Palangkaraya	Palembang	7,252,000	4,022,000
271	Palangkaraya	PekanBaru	8,803,000	4,696,000
272	Palangkaraya	Semarang	7,252,000	3,947,000
273	Palangkaraya	Solo	7,252,000	4,086,000
274	Palangkaraya	Surabaya	8,696,000	4,385,000
275	Palembang	Balikpapan	9,894,000	5,220,000
276	Palembang	Makasar	9,466,000	4,781,000
277	Palembang	Pontianak	6,685,000	3,840,000
278	Palembang	Semarang	6,236,000	3,305,000
279	Palembang	Solo	6,236,000	3,444,000
280	Palembang	Surabaya	7,690,000	3,744,000
281	Palembang	Timika	15,210,000	8,076,000
282	Palu	Makasar	4,268,000	2,578,000
283	Palu	Poso	1,957,000	1,423,000
284	Palu	Sorong	6,878,000	3,883,000
285	Palu	Surabaya	6,878,000	3,883,000
286	Palu	Toli Toli	2,941,000	1,915,000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9,038,000	4,631,000
288	Pangkal Pinang	Banjar Masin	7,091,000	3,915,000
289	Pangkal Pinang	Batam	6,739,000	3,818,000
290	Pangkal Pinang	Jokjakarta	6,065,000	3,262,000
291	Pangkal Pinang	Makasar	9,060,000	4,663,000
292	Pangkal Pinang	Manado	12,097,000	5,808,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 67 -

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
293	Pangkal Pinang	Medan	8,888,000	4,653,000
294	Pangkal Pinang	Padang	7,337,000	3,883,000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5,829,000	3,262,000
296	Pangkal Pinang	Pekan Baru	7,391,000	3,936,000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6,279,000	3,733,000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5,829,000	3,187,000
299	Pangkal Pinang	Solo	5,829,000	3,326,000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7,284,000	3,626,000
301	Pekan Baru	Pontianak	8,247,000	4,514,000
302	Pekan Baru	Semarang	7,797,000	3,979,000
303	Pekan Baru	Solo	7,797,000	4,118,000
304	Pekan Baru	Surabaya	9,241,000	4,407,000
305	Pekan Baru	Timika	16,771,000	8,739,000
306	Pontianak	Makasar	9,915,000	5,241,000
307	Pontianak	Semarang	6,685,000	3,765,000
308	Pontianak	Solo	6,685,000	3,904,000
309	Pontianak	Surabaya	8,140,000	4,204,000
310	Pontianak	Timika	15,659,000	8,535,000
311	Semarang	Makasar	9,466,000	4,706,000
312	Solo	Makasar	9,466,000	4,845,000
313	Surabaya	Denpasar	3,198,000	1,979,000
314	Surabaya	Jaya pura	12,675,000	7,231,000
315	Surabaya	Makasar	5,936,000	3,433,000
316	Surabaya	Timika	11,295,000	6,589,000

2.2 BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- a. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

Keberangkatan:

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan,

Kepulangan:

- 3) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- 4) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 68 -

- b. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- d. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (*at-cost*).
- e. Pembiayaan Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- f. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Provinsi	Satuan	Satuan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/ Kali	127,000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	308,000
3	Riau	Orang/ Kali	101,000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165,000
5	Jambi	Orang/ Kali	147,000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190,000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	179,000
8	Lampung	Orang/ Kali	168,000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	109,000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	97,000
11	Banten	Orang/ Kali	536,000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	200,000
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	256,000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	108,000
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	267,000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	233,000
17	Bali	Orang/ Kali	227,000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	116,000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	171,000
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	134,000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	180,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 69 -

No	Provinsi	Satuan	Satuan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	533,000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	218,000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138,000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	265,000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313,000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	187,000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165,000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171,000
31	Maluku	Orang/ Kali	288,000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	215,000
33	Papua	Orang/ Kali	513,000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	236,000
35	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236,000
36	Papua Tengah	Orang/ Kali	513,000
37	Papua Selatan	Orang/ Kali	513,000
38	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513,000

2.3 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

- a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (*at cost*).
- d. Pembiayaan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at-cost*).



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 70 -

- e. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) terinci pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kota/Kabupaten Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	OK	275,000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	OK	298,000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	OK	183,000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	OK	238,000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	OK	325,000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	OK	420,000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	OK	315,000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	OK	293,000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	OK	460,000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	OK	289,000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	OK	270,000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	OK	278,000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	OK	220,000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	OK	370,000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	OK	275,000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	OK	190,000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	OK	205,000
18	Banda Aceh	Kab. Aceh Langsa	OK	301,000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	OK	240,000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	OK	400,000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	OK	259,000
22	Medan	Kab. Batubara	OK	225,000
23	Medan	Kab. Dairi	OK	270,000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	OK	186,000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	OK	300,000
26	Medan	Kab. Karo	OK	200,000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	OK	287,000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	OK	360,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 71 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	OK	300,000
30	Medan	Kab. Langkat	OK	186,000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	OK	420,000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	OK	420,000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	OK	420,000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	OK	300,000
35	Medan	Kab. Samosir	OK	330,000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	OK	200,000
37	Medan	Kab. Simalungun	OK	264,000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	OK	328,000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	OK	345,000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	OK	330,000
41	Medan	Kab. Toba	OK	300,000
42	Medan	Kota Binjai	OK	180,000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	OK	225,000
44	Medan	Kota Sibolga	OK	345,000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	OK	285,000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	OK	203,000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	OK	380,000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	OK	315,000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	OK	200,000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	OK	300,000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	OK	225,000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	OK	350,000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	OK	322,000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	OK	350,000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	OK	400,000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	OK	185,000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	OK	175,000
58	Jambi	Kab. Bungo	OK	270,000
59	Jambi	Kab. Kerinci	OK	325,000
60	Jambi	Kab. Merangin	OK	260,000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	OK	170,000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	OK	241,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 72 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	OK	225,000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	OK	190,000
65	Jambi	Kab. Tebo	OK	250,000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	OK	308,000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	OK	225,000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	OK	250,000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	OK	225,000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	OK	205,000
71	Padang	Kab. Pasaman	OK	250,000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	OK	250,000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	OK	205,000
74	Padang	Kab. Sijunjung	OK	225,000
75	Padang	Kab. Solok	OK	210,000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	OK	250,000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	OK	220,000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	OK	215,000
79	Padang	Kota Padang Panjang	OK	210,000
80	Padang	Kota Pariaman	OK	200,000
81	Padang	Kota Payakumbuh	OK	225,000
82	Padang	Kota Sawahlunto	OK	215,000
83	Padang	Kota Solok	OK	210,000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	OK	203,000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	OK	315,000
86	Palembang	Kab. Lahat	OK	250,000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	OK	235,000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	OK	235,000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	OK	320,000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	OK	325,000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	OK	205,000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	OK	205,000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	OK	248,000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	OK	250,000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	OK	245,000
96	Palembang	Kab. Pali	OK	265,000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	OK	290,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 73 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
98	Palembang	Kota Pagar Alam	OK	280,000
99	Palembang	Kota Prabumulih	OK	205,000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	OK	270,000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	OK	234,000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	OK	246,000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	OK	246,000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	OK	252,000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	OK	276,000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	OK	216,000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	OK	200,000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	OK	222,000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	OK	240,000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	OK	252,000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	OK	267,000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	OK	270,000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	OK	234,000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	OK	344,000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	OK	232,000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	OK	313,000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	OK	385,000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	OK	298,000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	OK	375,000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	OK	423,000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	OK	313,000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	OK	282,000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	OK	250,000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	OK	275,000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	OK	275,000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	OK	250,000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	OK	208,000
128	Serang	Kab. Pandeglang	OK	138,000
129	Serang	Kab. Serang	OK	160,000
130	Serang	Kab. Tangerang	OK	254,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 74 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
131	Serang	Kota Cilegon	OK	160,000
132	Serang	Kota Tangerang	OK	313,000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	OK	347,000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	OK	183,000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	OK	275,000
136	Bandung	Kab. Bekasi	OK	265,000
137	Bandung	Kab. Bogor	OK	185,000
138	Bandung	Kab. Ciamis	OK	245,000
139	Bandung	Kab. Cianjur	OK	215,000
140	Bandung	Kab. Cirebon	OK	280,000
141	Bandung	Kab. Garut	OK	243,000
142	Bandung	Kab. Indramayu	OK	275,000
143	Bandung	Kab. Karawang	OK	248,000
144	Bandung	Kab. Kuningan	OK	275,000
145	Bandung	Kab. Majalengka	OK	235,000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	OK	283,000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	OK	218,000
148	Bandung	Kab. Subang	OK	208,000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	OK	245,000
150	Bandung	Kab. Sumedang	OK	230,000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	OK	245,000
152	Bandung	Kota Banjar	OK	283,000
153	Bandung	Kota Bekasi	OK	265,000
154	Bandung	Kota Bogor	OK	285,000
155	Bandung	Kota Cimahi	OK	168,000
156	Bandung	Kota Cirebon	OK	270,000
157	Bandung	Kota Depok	OK	275,000
158	Bandung	Kota Sukabumi	OK	226,000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	OK	245,000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	OK	260,000
161	Semarang	Kab. Banyumas	OK	257,000
162	Semarang	Kab. Batang	OK	245,000
163	Semarang	Kab. Blora	OK	270,000
164	Semarang	Kab. Boyolali	OK	240,000
165	Semarang	Kab. Brebes	OK	263,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 75 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
166	Semarang	Kab. Cilacap	OK	280,000
167	Semarang	Kab. Demak	OK	230,000
168	Semarang	Kab. Grobogan	OK	235,000
169	Semarang	Kab. Jepara	OK	240,000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	OK	250,000
171	Semarang	Kab. Kebumen	OK	260,000
172	Semarang	Kab. Kendal	OK	230,000
173	Semarang	Kab. Klaten	OK	250,000
174	Semarang	Kab. Kudus	OK	235,000
175	Semarang	Kab. Magelang	OK	240,000
176	Semarang	Kab. Pati	OK	240,000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	OK	245,000
178	Semarang	Kab. Pemalang	OK	250,000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	OK	270,000
180	Semarang	Kab. Purworejo	OK	250,000
181	Semarang	Kab. Rembang	OK	250,000
182	Semarang	Kab. Semarang	OK	230,000
183	Semarang	Kab. Sragen	OK	250,000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	OK	250,000
185	Semarang	Kab. Tegal	OK	260,000
186	Semarang	Kab. Temanggung	OK	240,000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	OK	250,000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	OK	250,000
189	Semarang	Kota Magelang	OK	240,000
190	Semarang	Kota Pekalongan	OK	245,000
191	Semarang	Kota Salatiga	OK	235,000
192	Semarang	Kota Surakarta	OK	245,000
193	Semarang	Kota Tegal	OK	260,000
DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	OK	250,000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	OK	350,000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	OK	350,000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	OK	200,000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	OK	225,000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	OK	285,000
200	Surabaya	Kab. Blitar	OK	255,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 76 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	OK	225,000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	OK	255,000
203	Surabaya	Kab. Gresik	OK	225,000
204	Surabaya	Kab. Jember	OK	261,000
205	Surabaya	Kab. Jombang	OK	235,000
206	Surabaya	Kab. Kediri	OK	235,000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	OK	225,000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	OK	261,000
209	Surabaya	Kab. Madiun	OK	245,000
210	Surabaya	Kab. Magetan	OK	253,000
211	Surabaya	Kab. Malang	OK	228,000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	OK	225,000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	OK	245,000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	OK	253,000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	OK	285,000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	OK	243,000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	OK	228,000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	OK	255,000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	OK	228,000
220	Surabaya	Kab. Sampang	OK	235,000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	OK	240,000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	OK	255,000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	OK	255,000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	OK	245,000
225	Surabaya	Kab. Tuban	OK	245,000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	OK	245,000
227	Surabaya	Kota Batu	OK	242,000
228	Surabaya	Kota Blitar	OK	255,000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	OK	225,000
230	Surabaya	Kota Kediri	OK	235,000
231	Surabaya	Kota Madiun	OK	245,000
232	Surabaya	Kota Malang	OK	228,000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	OK	225,000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	OK	228,000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	OK	188,000
236	Denpasar	Kab. Bangli	OK	225,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 77 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
237	Denpasar	Kab. Buleleng	OK	265,000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	OK	225,000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	OK	270,000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	OK	263,000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	OK	225,000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	OK	325,000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	OK	450,000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	OK	350,000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	OK	325,000
246	Kupang	Kab. Ende	OK	175,000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	OK	218,000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	OK	275,000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	OK	270,000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	OK	550,000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	OK	550,000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	OK	550,000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	OK	185,000
254	Pontianak	Kab. Landak	OK	270,000
255	Pontianak	Kab. Melawi	OK	430,000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	OK	230,000
257	Pontianak	Kab. Sambas	OK	300,000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	OK	303,000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	OK	343,000
260	Pontianak	Kab. Sintang	OK	392,000
261	Pontianak	Kota Singkawang	OK	257,000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	OK	290,000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	OK	333,000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	OK	425,000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	OK	300,000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	OK	275,000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	OK	250,000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	OK	425,000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	OK	300,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 78 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	OK	525,000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	OK	448,000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	OK	250,000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	OK	328,000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	OK	525,000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	OK	230,000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	OK	170,000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	OK	200,000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	OK	200,000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	OK	212,000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	OK	218,000
281	Banjarmasin	Kab. Kotabaru	OK	290,000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	OK	234,000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	OK	300,000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	OK	200,000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	OK	189,000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	OK	225,000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	OK	1.500,000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	OK	500,000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	OK	1.350,000
290	Samarinda	Kab. Paser	OK	1.650,000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	OK	650,000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	OK	550,000
293	Samarinda	Kota Bontang	OK	600,000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	OK	250,000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	OK	275,000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	OK	250,000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	OK	300,000
298	Manado	Kab. Minahasa	OK	180,000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	OK	180,000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	OK	200,000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	OK	175,000
302	Manado	Kota Bitung	OK	175,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 79 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
303	Manado	Kota Kotamobagu	OK	250,000
304	Manado	Kota Tomohon	OK	170,000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	OK	400,000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	OK	300,000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	OK	350,000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	OK	650,000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	OK	240,000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	OK	359,000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	OK	200,000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	OK	270,000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	OK	260,000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	OK	235,000
315	Makassar	Kab. Barru	OK	210,000
316	Makassar	Kab. Bone	OK	240,000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	OK	240,000
318	Makassar	Kab. Enrekang	OK	250,000
319	Makassar	Kab. Gowa	OK	175,000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	OK	230,000
321	Makassar	Kab. Luwu	OK	350,000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	OK	375,000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	OK	365,000
324	Makassar	Kab. Maros	OK	170,000
325	Makassar	Kab. Pinrang	OK	230,000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	OK	230,000
327	Makassar	Kab. Sinjai	OK	235,000
328	Makassar	Kab. Soppeng	OK	235,000
329	Makassar	Kab. Takalar	OK	190,000
330	Makassar	Kab. Tana Toraja	OK	350,000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	OK	350,000
332	Makassar	Kab. Wajo	OK	230,000
333	Makassar	Kota Palopo	OK	350,000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	OK	225,000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	OK	400,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 80 -

No.	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp.)
336	Palu	Kab. Buol	OK	472,000
337	Palu	Kab. Donggala	OK	130,000
338	Palu	Kab. Morowali	OK	400,000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	OK	400,000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	OK	250,000
341	Palu	Kab. Poso	OK	280,000
342	Palu	Kab. Sigi	OK	219,000
343	Palu	Kab. Tojo Una-Una	OK	350,000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	OK	412,000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	OK	355,000
346	Kendari	Kab. Kolaka	OK	370,000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	OK	300,000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	OK	425,000
349	Kendari	Kab. Konawe	OK	300,000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	OK	305,000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	OK	300,000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	OK	850,000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	OK	1.000,000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	OK	1.250,000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	OK	900,000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	OK	600,000
357	Jayapura	Kab. Keerom	OK	900,000
358	Jayapura	Kota Sarmi	OK	2.700,000
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	OK	900,000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	OK	750,000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	OK	2.650,000

2.4 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KHUSUS JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

- a. Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 81 -

Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

- b. Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (*at-cost*).
- d. Pembiayaan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- e. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*one way*) terinci pada Tabel 3.4.4.

Tabel 2.5

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Daerah Khusus Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

No	Ibu Kota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Satuan Biaya
1	Jakarta	Kota Bekasi	OK	284,000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	OK	284,000
3	Jakarta	Kab. Bogor	OK	300,000
4	Jakarta	Kota Bogor	OK	300,000
5	Jakarta	Kota Depok	OK	275,000
6	Jakarta	Kota Tangerang	OK	286,000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	OK	286,000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	OK	310,000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	OK	428,000

2.5 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU (PP)

- a. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Kabupaten Bengkulu ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 82 -

- b. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost).
- d. Pembiayaan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/ kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
- e. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu (PP) terinci pada Tabel 3.4.5.

Tabel 2.6

Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Bengkulu Utara Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (Pergi Pulang/PP)

No	Tujuan	Biaya Transport (PP) Pertamina (OP)	Biaya Transport (PP) Solar Dex (OP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Bengkulu	250,000	285,000
2	Kota Bengkulu (Bandara Fatmawati)	330,000	380,000
3	Bengkulu Tengah	330,000	370,000
4	Lebong	310,000	350,000
5	Seluma	430,000	490,000
6	Kepahiang	420,000	480,000
7	Rejang Lebong	450,000	510,000
8	Muko-muko	744,000	856,000
9	Bengkulu Selatan	576,000	664,000
10	Kaur	808,000	920,000

2.6 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN BENGKULU UTARA KE IBUKOTA KABUPATEN/KOTA PROVINSI TETANGGA (PERGI PULANG/PP)

- a. Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Kabupaten Bengkulu ke tempat tujuan di ibukota kabupaten/kota Provinsi tetangga atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 83 -

- b. Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (*at-cost*).
- d. Pembiayaan biaya transportasi darat Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten / kota Provinsi Tetangga (PP) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 3.4.6 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- e. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara ke Ibukota kabupaten/kota Provinsi Tetangga (PP) terinci pada Tabel 3.4.6.

Tabel 2.7

Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara (Kota Arga Makmur) Ke Ibukota Kabupaten/Kota Provinsi Tetangga (PP)

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Nama Ibukota	Biaya Transport (Pp) (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Arga Makmur	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	649,000
2	Arga Makmur	Kab. Musi Rawas	Muara Beliti Baru	649,000
3	Arga Makmur	Kab. Musi Rawas Utara	Rupit	649,000
4	Arga Makmur	Kab. Empat Lawang	Tebing Tinggi	704,000
5	Arga Makmur	Kab. Lahat	Lahat	704,000
6	Arga Makmur	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	759,000
7	Arga Makmur	Kab. Muara Enim	Muara Enim	759,000
8	Arga Makmur	Kab. Banyuasin	Pangkalan Balai	759,000
9	Arga Makmur	Kota Prabumulih	Prabumulih	814,000
10	Arga Makmur	Kab. Ogan Komering Ulu	Baturaja	814,000
11	Arga Makmur	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi	814,000
12	Arga Makmur	Kab. Ogan Ilir	Indra Laya	814,000
13	Arga Makmur	Kab. Musi Banyuasin	Sekayu	814,000
14	Arga Makmur	Kota Palembang	Pelembang	814,000
15	Arga Makmur	Kab. Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	814,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 84 -

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Nama Ibukota	Biaya Transport (Pp) (Rp.)
1	2	3	4	5
16	Arga Makmur	Kab. O.K.U Selatan	Muara Dua	814,000
17	Arga Makmur	Kab. O.K.U Utara	Martapura	814,000
18	Arga Makmur	Kab. Pesisir Barat	Krui	759,000
19	Arga Makmur	Kab. Lampung Barat	Liwa	759,000
20	Arga Makmur	Kab. Pesawaran	Gedong Tataan	759,000
21	Arga Makmur	Kab. Tenggamus	Kota Agung	759,000
22	Arga Makmur	Kab. Mesuji	Mesuji	814,000
23	Arga Makmur	Kab. Pringsewu	Pringsewu	814,000
24	Arga Makmur	Kab. Lampung Selatan	Kalianda	814,000
25	Arga Makmur	Kab. Lampung Tengah	Gunung Sugih	814,000
26	Arga Makmur	Kab. Lampung Timur	Sukadana	814,000
27	Arga Makmur	Kab. Lampung Utara	Kota Bumi	814,000
28	Arga Makmur	Kab. Tulang Bawang	Menggala	814,000
29	Arga Makmur	Kab. Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang	814,000
30	Arga Makmur	Kab. Way Kanan	Blambangan Umpu	814,000
31	Arga Makmur	Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	814,000
32	Arga Makmur	Kota Metro	Gunung Sugih	814,000
33	Arga Makmur	Kab. Sorolangun	Sorolangun	704,000
34	Arga Makmur	Kab. Merangin	Bangko	704,000
35	Arga Makmur	Kab. Bungo	Muara Bungo	704,000
36	Arga Makmur	Kab. Tebo	Muara Tebo	814,000
37	Arga Makmur	Kab. Batanghari	Muara Bulian	814,000
38	Arga Makmur	Kota Jambi	Jambi	814,000
39	Arga Makmur	Kab. Muaro Jambi	Sengeti	814,000
40	Arga Makmur	Kota Sungai Penuh	Sungai Penuh	869,000
41	Arga Makmur	Kab. Kerinci	Siulak	869,000
42	Arga Makmur	Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal	980,000
43	Arga Makmur	Kab. Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak	980,000
44	Arga Makmur	Kab. Pesisir Selatan	Painan	704,000
45	Arga Makmur	Kab. Padang Pariaman	Parit Malintang	814,000
46	Arga Makmur	Kota Padang Pariaman	Kota Pariaman	814,000
47	Arga Makmur	Kab. Dharmasraya	Pulau Panjang	814,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 85 -

No	Kota Asal	Kota Tujuan	Nama Ibukota	Biaya Transport (Pp) (Rp.)
1	2	3	4	5
48	Arga Makmur	Kota Sawah Lunto	Sawah Lunto	814,000
49	Arga Makmur	Kab. Sijunjung	Muaro Sijunjung	814,000
50	Arga Makmur	Kota Solok	Aro Suko	814,000
51	Arga Makmur	Kab. Solok Selatan	Padang Aro	814,000
52	Arga Makmur	Kota Solok	Solok	814,000
53	Arga Makmur	Kota Padang Panjang	Padang Panjang	814,000
54	Arga Makmur	Kota Bukit Tinggi	Bukit Tinggi	814,000
55	Arga Makmur	Kota Padang	Padang	814,000
56	Arga Makmur	Kab. Agam	Lubuk Basung	869,000
57	Arga Makmur	Kab. Tanah Datar	Batu Sangkar	869,000
58	Arga Makmur	Kota Payakumbuh	Payakumbuh	869,000
59	Arga Makmur	Kab. Lima Puluh Kota	Sari Lamak	925,000
60	Arga Makmur	Kab. Pasaman	Subuk Sikaping	925,000
61	Arga Makmur	Kab. Pasaman Barat	Simpang Ampek	925,000

2.7 BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN DALAM KOTA

- a. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati.
- c. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu hanya digunakan untuk Kegiatan yang sifatnya insidental / tidak terus menerus.
- d. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan dalam Kota Bengkulu sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- e. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- f. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (at-cost).
- g. Satuan biaya transportasi sewa kendaraan terinci pada Tabel 2.8 dan 2.9



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 86 -

Tabel 2.8

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
INSIDENTIL**

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	Per hari	962,000	3,479,000	4,810,000
2	Sumatera Utara	Per hari	1,220,000	3,062,000	3,753,000
3	Riau	Per hari	978,000	3,155,000	4,585,000
4	Kepulauan Riau	Per hari	1,049,000	2,373,000	3,910,000
5	Jambi	Per hari	1,152,000	5,585,000	7,190,000
6	Sumatera Barat	Per hari	922,000	2,432,000	3,500,000
7	Sumatrea Selatan	Per hari	1,507,000	2,200,000	4,097,000
8	Lampung	Per hari	897,000	3,594,000	5,052,000
9	Bengkulu	Per hari	988,000	5,145,000	7,000,000
10	Bangka Belitung	Per hari	1,258,000	3,477,000	5,342,000
11	Banten	Per hari	1,017,000	3,208,000	4,368,000
12	Jawa Barat	Per hari	1,018,000	2,563,000	4,000,000
13	DKI Jakarta	Per hari	1,305,000	2,816,000	3,938,000
14	Jawa Tengah	Per hari	1,347,000	3,063,000	4,492,000
15	DI Yogyakarta	Per hari	1,287,000	2,570,000	3,930,000
16	Jawa Timur	Per hari	1,212,000	2,446,000	3,303,000
17	Bali	Per hari	1,275,000	3,174,000	4,224,000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1,103,000	2,532,000	4,062,000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926,000	3,059,000	3,468,000
20	Kalimantan Barat	Per hari	921,000	3,471,000	4,848,000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1,177,000	4,924,000	6,706,000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	921,000	2,719,000	3,834,000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1,100,000	3,194,000	4,829,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 87 -

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Kalimantan Utara	Per hari	1,188,000	2,713,000	4,829,000
25	Sulawesi Utara	Per hari	1,195,000	2,648,000	4,006,000
26	Gorontalo	Per hari	980,000	2,504,000	4,080,000
27	Sulawesi Barat	Per hari	914,000	3,327,000	3,479,000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	938,000	3,385,000	4,293,000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824,000	2,423,000	4,465,000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	945,000	2,700,000	5,150,000
31	Maluku	Per hari	1,241,000	3,590,000	4,021,000
32	Maluku Utara	Per hari	1,095,000	3,013,000	4,170,000
33	Papua	Per hari	1,204,000	4,082,000	5,248,000
34	Papua Barat	Per hari	1,171,000	3,499,000	4,547,000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1,171,000	3,499,000	4,547,000
36	Papua Tengah	Per hari	1,204,000	4,082,000	5,248,000
37	Papua Selatan	Per hari	1,638,000	6,001,000	7,715,000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1,649,000	6,041,000	7,767,000

Tabel 2.9

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kendaraan Kepala Daerah atau Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Per bulan	18,720,000	
Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	13,500,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 88 -

2.8 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN BENGKULU UTARA (KOTA ARGA MAKMUR) KE KOTA KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARA (PERGI PULANG)

- a. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara (kota Arga Makmur) ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Arga Makmur ke tempat tujuan di kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) merupakan satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran; dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) berlaku pertanggungjawaban pengeluaran secara riil (*at-cost*).
- d. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) terbagi menjadi satuan biaya perjalanan darat dan Satuan biaya perjalanan lainnya (Laut).
- e. Pembiayaan biaya transportasi darat, laut dan udara dari kota Arga Makmur ke Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) dapat dilaksanakan melebihi standar Biaya pada tabel 2.10 dan 2.11 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*). Khusus penyeberangan dari Bengkulu ke Kecamatan Enggano atau sebaliknya berlaku perhitungan sekali jalan (*one way*).
- f. Satuan biaya transportasi perjalanan darat dari ibu kota kecamatan ke desa dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Utara (Pergi Pulang) terinci pada Tabel 2.12.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 89 -

Tabel 2.10

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA ARGA MAKMUR KE
KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN BENGKULU UTARA (PERGI PULANG)**

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport Pergi Pulang (PP) Pertamina 13300 (OP)	Biaya Transport Pergi Pulang (PP) SOLAR DEX 16850 (OP)
1	2	3	4	5
1	Arga Makmur	Arma Jaya	69,000	79,000
2	Arga Makmur	Air Besi	55,000	63,000
3	Arga Makmur	Padang Jaya	69,000	79,000
4	Arga Makmur	Tanjung Agung Palik	83,000	95,000
5	Arga Makmur	Hulu Palik	69,000	79,000
6	Arga Makmur	Air Padang	138,000	158,000
7	Arga Makmur	Lais	110,000	126,000
8	Arga Makmur	Kerkap	110,000	126,000
9	Arga Makmur	Batik Nau	110,000	126,000
10	Arga Makmur	Giri Mulya	138,000	158,000
11	Arga Makmur	Air Napal	124,000	142,000
12	Arga Makmur	Ketahun	248,000	284,000
13	Arga Makmur	Ulok Kupai	386,000	442,000
14	Arga Makmur	Napal Putih	386,000	442,000
15	Arga Makmur	Putri Hijau	373,000	427,000
16	Arga Makmur	Pinang Raya	304,000	348,000
17	Arga Makmur	Marga Sakti Sebelat	400,000	458,000

Tabel 2.11

**BIAYA TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA (PENYEBERANGAN) DARI BENGKULU
KE KECAMATAN ENGGANO (ONE WAY)**

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (OP) PP	Keterangan
KAPAL (PENYEBERANGAN LAUT)				
A	PENUMPANG			
	Kelas Ekonomi			
	a. Dewasa (diatas 2 th)	Tiket/Orang	67,000	
	b. Bayi (maks 2 th)	Tiket/Orang	6,700	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 90 -

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (OP) PP	Keterangan
B	KENDARAAN			
	Golongan I	Unit	50,000	Sepeda kayuh
	Golongan II	Unit	125,000	Sepeda Motor
	Golongan III	Unit	300,000	Becak, Sepeda Motor 500cc
	Golongan IV			
	a. Kendaraan penumpang	Unit	1,350,000	Minibus
	b. kendaraan barang	Unit	910,000	Pick-Up
	Golongan V			
	a. Kendaraan penumpang	Unit	2,185,000	Bus Sedang
	b. kendaraan barang	Unit	1,700,000	Truk Sedang
	Golongan VI			
	a. Kendaraan penumpang	Unit	3,400,000	Bus Besar
	b. kendaraan barang	Unit	2,750,000	Truk Besar
	Golongan VII	Unit	4,100,000	Truk Tronton
	Golongan VIII	Unit	6,200,000	Trailer
	Golongan IX	Unit	9,250,000	Alat Berat
PESAWAT (PENYEBERANGAN UDARA)				
	Bengkulu-Enggano	Tiket/orang	306,920	Harga dapat berubah sewaktu-waktu
	Enggano-Bengkulu	Tiket/orang	255,320	

Keterangan :

- Tarif sudah termasuk asuransi
- Tarif belum termasuk Pas Masuk Pelabuhan dan Bandara



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 91 -

2.9 BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE DESA DALAM LINGKUP KECAMATAN DIMAKSUD (PERGI PULANG/PP)

Tabel 2.12

BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA KE DESA DALAM LINGKUP KECAMATAN DIMAKSUD (PERGI PULANG/ PP)

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina	Biaya Transport (Pp) Solar Dex
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	Air Besi (Dusun Curup)	1. Genting Perangkap	14,000	16,000
		2. Lubuk Balam	28,000	32,000
		3. Datar Macang	28,000	32,000
		4. Sungai Pura	55,000	63,000
		5. Talang Pungguk	55,000	63,000
		6. Tanjung Genting	55,000	63,000
		7. Talang Renah	55,000	63,000
		8. Talang Baru Ginting	55,000	63,000
		9. Talang Lembak	69,000	79,000
		10. Tanjung Karet	69,000	79,000
		11. Kota Agung	69,000	79,000
		12. Penyangkak	69,000	79,000
		13. Talang Ginting	97,000	111,000
		14. Kertapati	97,000	111,000
2	Air Napal (Pasar Tebat)	1. Selubuk	14,000	16,000
		2. Lubuk Tanjung	14,000	16,000
		3. Pasar Palik	14,000	16,000
		4. Talang Kering	14,000	16,000
		5. Talang Jarang	28,000	32,000
		6. Tebing Kandang	28,000	32,000
		7. Pukur	28,000	32,000
		8. Air Napal	28,000	32,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 92 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
		9. Pasar Kerkap	28,000	32,000
		10. Tepi Laut	41,000	47,000
		11. Pasar Bembah	41,000	47,000
3	Air Padang (Kembang Manis)	1. Padang Kala	14,000	16,000
		2. Tanjung Aur	28,000	32,000
		3. Teluk Ajang	28,000	32,000
		4. Dusun Balam	41,000	47,000
		5. Sukarami	41,000	47,000
		6. Mesigit	41,000	47,000
		7. Retes	41,000	47,000
		8. Talang Ulu	41,000	47,000
		9. Lubuk Mumpo	69,000	79,000
4	Arga Makmur (Purwodadi)	1. Gunung Alam	0	0
		2. Datar Ruyung	14,000	16,000
		3. Karang Suci	14,000	16,000
		4. Rama Agung	14,000	16,000
		5. Karang Anyar Ilir	14,000	16,000
		6. Karang Anyar	14,000	16,000
		7. Taba Tembilang	14,000	16,000
		8. Sido Urip	14,000	16,000
		9. Gunung Agung	14,000	16,000
		10. Tanjung Raman	14,000	16,000
		11. Lubuk Sahung	14,000	16,000
		12. Senali	28,000	32,000
		13. Gunung Selan	28,000	32,000
		14. Talang Denau	41,000	47,000
		15. Kuro Tidur	41,000	47,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 93 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
5	Arma Jaya (Sumber Agung)	1. Sidodadi	14,000	16,000
		2. Gunung Besar	28,000	32,000
		3. Kemumu	28,000	32,000
		4. Pematang Sapang	28,000	32,000
		5. Tebing Kaning	28,000	32,000
		6. Pagar Ruyung	28,000	32,000
		7. Pagar Banyu	28,000	32,000
		8. Air Merah	41,000	47,000
		9. Gardu	41,000	47,000
		10. Kalai Duai	41,000	47,000
		11. Kali	55,000	63,000
6	Batik Nau (Batik Nau)	1. Sukamarga	14,000	16,000
		2. Batik Nau	14,000	16,000
		3. Samban Jaya	14,000	16,000
		4. Bintunan	14,000	16,000
		5. Pagar Ruyung	14,000	16,000
		6. Durian Amparan	28,000	32,000
		7. Paninjau	41,000	47,000
		8. Air Manganyau	41,000	47,000
		9. Air Lakok	41,000	47,000
		10. Taba Kelintang	41,000	47,000
		11. Selolong	41,000	47,000
		12. Ulak Tanding	41,000	47,000
		13. Serangai	55,000	63,000
		14. Sekiau	69,000	79,000
		15. Seberang Tunggal	83,000	95,000
7	Enggano (Apoho)	1. Malakoni	14,000	16,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 94 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
		2. Meok	28,000	32,000
		3. Kaana	55,000	63,000
		4. Banjar Sari	69,000	79,000
		5. Kahyapu	83,000	95,000
8	Giri Mulya (Giri Mulya)	1. Wonoharjo	14,000	16,000
		2. Tanjung Anom	28,000	32,000
		3. Suka Mulya	28,000	32,000
		4. Suka Makmur	41,000	47,000
		5. Rena Jaya	41,000	47,000
9	Hulu Palik (Taba Padang Kol)	1. Air Banai	14,000	16,000
		2. Taba Padang Rejang	14,000	16,000
		3. Batu Raja Kol	14,000	16,000
		4. Padang Bendar	14,000	16,000
		5. Batu Raja Rejang	14,000	16,000
		6. Air Baus I	14,000	16,000
		7. Batu Roto	28,000	32,000
		8. Air Baus II	28,000	32,000
		9. Pematang Balam	28,000	32,000
		10. Kota Lekat Mudik	41,000	47,000
		11. Kota Lekat Ilir	41,000	47,000
		12. Talang Rendah	41,000	47,000
		13. Batu Layang	41,000	47,000
		14. Sumber Rejo	41,000	47,000
10	Kerkap (Lubuk Durian)	1. Serumbung	14,000	16,000
		2. Kedu Baru	14,000	16,000
		3. Magelang	14,000	16,000
		4. Perbo	14,000	16,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 95 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
		5. Penyangkak	14,000	16,000
		6. Banyumas Lama	28,000	32,000
		7. Salam Harjo	14,000	16,000
		8. Jogya Baru	28,000	32,000
		9. Talang Curup	28,000	32,000
		10. Lubuk Jale	28,000	32,000
		11. Tanjung Putus	28,000	32,000
		12. Talang Pasak	28,000	32,000
		13. Simpang Ketenong	28,000	32,000
		14. Banyumas Baru	28,000	32,000
		15. Tebat Pacur	28,000	32,000
		16. Aur Gading	28,000	32,000
		17. Talang Jambu	55,000	63,000
11	Ketahun (Pasar Ketahun)	1. Pasar Ketahun	14,000	16,000
		2. Bukit Indah	14,000	16,000
		3. Giri Kencana	28,000	32,000
		4. Kuala Lelangi	41,000	47,000
		5. Bukit Tinggi	55,000	63,000
		6. Urai	55,000	63,000
		7. Talang Baru	69,000	79,000
		8. Sumber Mulya	69,000	79,000
		9. Dusun Raja	69,000	79,000
		10. Air Sekamanak	83,000	95,000
		11. Desa Baru Manunggal	124,000	142,000
		12. Lubuk Mindai	124,000	142,000
		13. Fajar Baru	138,000	158,000
		14. Alas Bangun	138,000	158,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 96 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamax	Biaya Transport (Pp) Solar Dex
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
		15. Lembah Duri	138,000	158,000
		16. Simpang Batu	152,000	174,000
		17. Melati Harjo	166,000	190,000
		18. Sebayur Jaya	179,000	205,000
		19. Limas Jaya	179,000	205,000
12	Lais (Pal Tiga Puluh)	1. Pasar Lais	14,000	16,000
		2. Jago Bayo	28,000	32,000
		3. Lubuk Lesung	28,000	32,000
		4. Dusun Raja	28,000	32,000
		5. Durian Daun	28,000	32,000
		6. Talang Rasau	41,000	47,000
		7. Lubuk Gedang	41,000	47,000
		8. Air Padang	41,000	47,000
		9. Datar Lebar	55,000	63,000
		10 Suka Langu	55,000	63,000
		11. Taba Baru	69,000	79,000
		12. Kalbang	69,000	79,000
13	Napal Putih (Air Tenang)	1. Napal Putih	14,000	16,000
		2. Teluk Anggung	14,000	16,000
		3. Tanjung Kemenyan	28,000	32,000
		4. Muara Santan	28,000	32,000
		5. Dusun Jabi	41,000	47,000
		6. Tanjung Alai	41,000	47,000
		7. Kinal Jaya	69,000	79,000
		8. Gembung Raya	83,000	95,000
		9. Lebong Tandai	152,000	174,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 97 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
14	Padang Jaya (Padang Jaya)	1. Sido Mukti	14,000	16,000
		2. Talang Tua	28,000	32,000
		3. Marga Sakti	28,000	32,000
		4. Tanjung Harapan	28,000	32,000
		5. Arga Mulya	28,000	32,000
		6. Marga Jaya	41,000	47,000
		7. Tambak Rejo	41,000	47,000
		8. Tanah Tinggi	55,000	63,000
		9. Lubuk Banyau	69,000	79,000
		10. Tanah Hitam	69,000	79,000
		11. Sido Luhur	69,000	79,000
15	Putri Hijau (Pasar Baru Kota Bani)	1. Pasar Baru Kota Bani	14,000	16,000
		2. Pasar Sebelat	14,000	16,000
		3. Talang Arah	28,000	32,000
		4. Air Muring	28,000	32,000
		5. Air Petai	28,000	32,000
		6. Karya Bakti	41,000	47,000
		7. Suka Baru	55,000	63,000
		8. Karang Pulau	83,000	95,000
		9. Cipta Mulya	97,000	111,000
		10. Air Pandan	110,000	126,000
		11. Karang Tengah	110,000	126,000
16	Tanjung Agung Palik (TAP)	1. Padang Sepan	14,000	16,000
		2. Lubuk Gading	41,000	47,000
		3. Lubuk Pendam	41,000	47,000
		4. Sawang Lebar	41,000	47,000
		5. Alun Dua	41,000	47,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 98 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
		6. Ketapi	41,000	47,000
		7. Sengkuang	41,000	47,000
		8. Lubuk Sematung	55,000	63,000
		9. Sawang Lebar Ilir	55,000	63,000
17	Ulok Kupai (Tanjung Dalam)	1. Bukit Berlian	14,000	16,000
		2. Air Lelangi	28,000	32,000
		3. Bukit Sari	41,000	47,000
		4. Pagar Din	41,000	47,000
		5. Pondok Bakil	69,000	79,000
		6. Talang Berantai	69,000	79,000
		7. Tanjung Harapan	69,000	79,000
		8. Tanjung Sari	69,000	79,000
		9. SP 7 Bangun Karya	69,000	79,000
18	Pinang Raya (Sumber Mulya)	1. Bumi Harjo	41,000	47,000
		2. Gunung Payung	41,000	47,000
		3. Bukit Harapan	55,000	63,000
		4. Tanjung Muara	41,000	47,000
		5. Marga Bakti	97,000	111,000
		6. Bukit Makmur	83,000	95,000
		7. Suka Manak	110,000	126,000
		8. Air Sebayur	331,000	379,000
		9. Air Simpang	331,000	379,000
19	Marga Sakti Sebelat (Suka Baru)	1. Karya Jaya	69,000	79,000
		2. Suka Negara	83,000	95,000
		3. Suka Medan	69,000	79,000
		4. Suka Merindu	110,000	126,000
		5. Suka Maju	41,000	47,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 99 -

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport (Pp) Pertamina (Rp)	Biaya Transport (Pp) Solar Dex (Rp)
1	2	3	4	5
		6. Suka Makmur	14,000	16,000
		7. Air Putih	28,000	32,000
		8. Karya Pelita	55,000	63,000
		9. Karya Bakti	69,000	79,000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Standar Harga Satuan Konsumsi Rapat berfungsi sebagai:

- batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
- berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Tabel 2.13

BIAYA KONSUMSI (MAKANAN DAN MINUMAN) RAPAT

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja makanan dan minuman rapat			Harga Satuan pada kolom 3 (tiga) dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan bukti pertanggungjawaban
a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara			
- Makan	OK	110,000	
- Kudapan (Snack)	OK	49,000	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 100 -

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
b. Rapat biasa			
- Makan	OK	48,000	
- Kudapan (Snack)	OK	16,000	

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (Dua Persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi :

- a. pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat,
- b. pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat; dan
- c. pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Standar Harga Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
- b. berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 101 -

Tabel 2.14
Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			Besaran pada kolom 3 (tiga) merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
Gedung bertingkat	m2/tahun	191,000	
Gedung tidak bertingkat	m2/tahun	131,000	
Halaman gedung/bangunan kantor	m2/tahun	10,000	

4.2 BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Standar Harga Satuan Pemeliharaan kendaraan dinas berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan
- b. berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 102 -

Tabel 2.15

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	45,670,000	
Anggota DPRD	Unit/tahun	44,010,000	
Pejabat Eselon I	Unit/tahun	42,350,000	
Pejabat Eselon II	Unit/tahun	42.340,000	
Kendaraan operasional roda 4	Unit/tahun	36,940,000	
Kendaraan operasional <i>double</i> gardan	Unit/tahun	39,570,000	
Kendaraan operasional roda 2	Unit/tahun	5,000,000	
Kendaraan operasional Roda 6	Unit/tahun	37,110,000	
Operasional <i>Speedboat</i>	Unit/tahun	20,240,000	

Tabel 2.16

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI**

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pejabat Eselon I	Unit/tahun	11,100,000	
Pejabat Eselon II	Unit/tahun	10,990,000	
Kendaraan operasional kantor	Unit/tahun	10,460,000	
Kendaraan roda 2	Unit/tahun	3.200,000	

4.3 BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Standar Harga Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran, dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 103 -

- b. berfungsi sebagai estimasi nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Tabel 2.17
Pemeliharaan Sarana Kantor

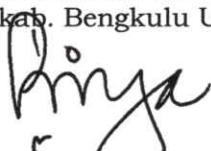
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Inventaris kantor	Pegawai/ Tahun	80,000	Yang dimaksud Inventaris kantor adalah yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi
<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730,000	
<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690,000	Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610,000	
Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000	
Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
Genset 300 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
Genset 350 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
Genset 400 KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	
Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,


IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 104 -

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN ANGGARAN ANGGARAN 2026

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON KONSTRUKSI
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2026**

Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program atau kegiatan oleh SKPD dan untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau kegiatan yang sejenis/ serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

**1. ASB-001 Bimbingan Teknis/Pelatihan/Sosialisasi Untuk ASN dan Masyarakat
(Jumlah Peserta Maksimal 40 orang)**

- a. Deskripsi : Bimbingan teknis/Pelatihan/Workshop merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD dan masyarakat untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Kegiatan dilaksanakan di dalam kantor tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari sosialisasi
Jumlah peserta
Jumlah jam pengajar
- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di dalam kantor dengan maksimal 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 5 hari



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 105 -

- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3
= 5,270,000 + (64,000 x Σ (peserta+panitia) x Σ hari)
+ (300,000 x Σ jam) + (200,000 x Σ jam)

- f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Fotocopy Materi	Tetap	5000	300	Lembar	1,500,000
3.	Spanduk	Tetap	18	115,000	M ²	2,070,000
4.	Konsumsi Rapat:	Variabel 1				64,000
	a. Makan siang	Variabel	1	48,000	box	48,000
	b. Snack	Variabel	1	16,000	box	16,000
5.	Honorarium Pengajar					
	a. dari Luar SKPD	Variabel	1	300,000	jam	300,000
	b. dari dalam SKPD	Variabel	1	200,000	jam	200,000
6.	Honorarium Panitia:					1,450,000
	a. Penanggung Jawab	Tetap	1	450,000	OK	450,000
	b. Ketua	Tetap	1	400,000	OK	400,000
	c. Sekretaris	Tetap	1	300,000	OK	300,000
	d. Anggota	Tetap	1	300,000	OK	300,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 106 -

**2. ASB-002 Bimbingan Teknis/Pelatihan/Sosialisasi Untuk ASN dan Masyarakat
(Jumlah Peserta Lebih Dari 40 orang)**

- a. Deskripsi : Bimbingan teknis/Pelatihan/Workshop merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD dan masyarakat untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Kegiatan dilaksanakan di dalam kantor tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari sosialisasi
Jumlah peserta
Jumlah jam pengajar
- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di dalam kantor dengan lebih dari 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 5 hari
- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 + Variabel 4
 $= 5,270,000 + (64,000 \times \Sigma \text{peserta} \times \Sigma \text{hari}) + (300,000 \times \Sigma \text{jam}) + (200,000 \times \Sigma \text{jam}) + (300,000 \times \Sigma \text{anggota panitia})$
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Fotocopy Materi	Tetap	6000	300	Lembar	1,800,000
3.	Spanduk	Tetap	18	115,000	M ²	2,070,000
4.	Konsumsi Rapat:	Variabel 1				64,000
	a. Makan siang	Variabel	1	48,000	box	48,000
	b. Snack	Variabel	1	16,000	box	16,000
5.	Honorarium Pengajar					
	a. dari Luar SKPD	Variabel 2	1	300,000	jam	300,000
	b. dari dalam SKPD	Variabel 3	1	200,000	jam	200,000
6.	Honorarium Panitia:					
	a. Penanggung Jawab	Tetap	1	450,000	OK	450,000
	b. Ketua	Tetap	1	400,000	OK	400,000
	c. Sekretaris	Tetap	1	300,000	OK	300,000
	d. Anggota	Variabel 4	1	300,000	OK	300,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 107 -

**3. ASB-003 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**

- a. Deskripsi : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari Musyawarah
Jumlah peserta
Jumlah jam pengajar
- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Pendidikan dan Pelatihan di luar kantor dengan lebih dari 40 peserta pelaksanaan sampai dengan 3 hari
- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3 + Variabel 4
 $= 6,770,000 + (64,000 \times \Sigma \text{peserta} \times \Sigma \text{hari}) + (300,000 \times \Sigma \text{jam}) + (200,000 \times \Sigma \text{jam}) + (300,000 \times \Sigma \text{anggota panitia})$
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Fotocopy Materi	Tetap	6000	300	Lembar	1,800,000
3.	Spanduk	Tetap	18	115,000	M ²	2,070,000
4.	Sewa gedung pertemuan	Variabel 1	1	1,500,000	hari	1,500,000
5.	Konsumsi Rapat:	Variabel 2				64,000
	a. Makan siang	Variabel	1	48,000	box	48,000
	b. Snack	Variabel	1	16,000	box	16,000
6.	Honorarium Pengajar					



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 108 -

	a. dari Luar SKPD	Variabel 3	1	300,000	jam	300,000
	b. dari dalam SKPD	Variabel 4	1	200,000	jam	200,000
7.	Honorarium Panitia:					
	a. Penanggung Jawab	Tetap	1	450,000	OK	450,000
	b. Ketua	Tetap	1	400,000	OK	400,000
	c. Sekretaris	Tetap	1	300,000	OK	300,000
	d. Anggota	Variabel 5	1	300,000	OK	300,000

Keterangan: Perhitungan Belanja belum termasuk Biaya Perjalanan Dinas

4. ASB-004 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

- a. Deskripsi : Penyusunan Renstra dan Renja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun ke depan yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat
Jumlah peserta rapat
- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Rapat di dalam kantor
- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3
= 250,000 + (1,000,000 x Σ buku) + (64,000 x Σ peserta x Σ hari)
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Cetak Dokumen	Variabel 1	1	1,000,000	buku	1,000,000
3.	Konsumsi Rapat:	Variabel 2				64,000
	a. Makan siang	Variabel	1	48,000	box	48,000
	b. Snack	Variabel	1	16,000	box	16,000



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 109 -

5. ASB-005 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

- a. Deskripsi : Penyusunan program dan kegiatan rencana kerja organisasi pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat
Jumlah peserta rapat
Jumlah produk dokumen
Bobot dokumen = 1.00 Jika SKPD Tipe C
Bobot dokumen = 1.33 Jika SKPD Tipe B
Bobot dokumen = 1.67 Jika SKPD Tipe A
Bobot dokumen = Y
- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Penyusunan dokumen hasil rapat di dalam kantor
- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2 + Belanja Variabel 3
 $= 250,000 + (1,000,000 \times Y \times \Sigma \text{ buku}) + (64,000 \times \Sigma \text{ peserta} \times \Sigma \text{ hari})$
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Cetak Dokumen	Variabel 1	1	1,000,000	buku	1,000,000
3.	Konsumsi Rapat:	Variabel 2				64,000
	a. Makan siang	Variabel	1	48,000	box	48,000
	b. Snack	Variabel	1	16,000	box	16,000

6. ASB-006 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER/ AKHIR TAHUN SKPD

- a. Deskripsi : Penyusunan Rencana Kerja organisasi pemerintah daerah untuk periode satu tahun ke depan yang mengacu pada dokumen renstra OPD.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat
Jumlah peserta rapat
Jumlah produk dokumen
Bobot dokumen = 1.0 Jika SKPD Tipe C



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 110 -

Bobot dokumen = 1.5 Jika SKPD Tipe B

Bobot dokumen = 2.0 Jika SKPD Tipe A

Bobot dokumen = Y

- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
- d. Aktifitas : Penyusunan dokumen laporan keuangan hasil rapat di luar kantor (di Kota Arga Makmur)
- e. Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel 2
 $= 250,000 + (1,000,000 \times Y \times \Sigma \text{ buku}) + (1,042,000 \times \Sigma \text{ peserta} \times \Sigma \text{ hari})$

f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Cetak Dokumen	Variabel 1	1	1,000,000	buku	1,000,000
3.	Paket Rapat di Luar Kantor	Variabel 2				1,042,000
	a. Paket Fullboard		1	912,000	hari	912,000
	b. Uang Harian		1	130,000	hari	130,000

7. ASB-007 LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- a. Deskripsi : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- b. Pengendali Belanja : Jumlah hari rapat
Jumlah peserta rapat
Jumlah produk dokumen
Bobot dokumen = 1.0 Jika SKPD Tipe C



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 111 -

Bobot dokumen = 1.5 Jika SKPD Tipe B

Bobot dokumen = 2.0 Jika SKPD Tipe A

Bobot dokumen = Y

- c. Jenis : ASB Non Konstruksi
d. Aktifitas : Penyusunan dokumen laporan
e. Perhitungan Belanja : Belanja Tetap + Belanja Variabel 1 + Belanja Variabel
Total 2
= 250,000 + (1,000,000x Y x Σ buku) + (1,042,000 x Σ peserta x Σ hari)

f. Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No.	Objek Belanja	Jenis Biaya	Volume	Harga Satuan	Satuan	Jumlah
1.	Alat Tulis Kantor	Tetap	1	250,000	Kegiatan	250,000
2.	Cetak Dokumen	Variabel 1	1	1,000,000	buku	1,000,000
3.	Paket Rapat di Luar Kantor	Variabel 2				1,042,000
	a. Paket Fullboard		1	912,000	hari	912,000
	b. Uang Harian		1	130,000	hari	130,000

Keterangan: Belanja tersebut tidak termasuk belanja perjalanan dinas.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 112 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

1. ASB-001 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Kebinamargaan /Jalan dan Jembatan,

- a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Kebinamargaan merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan dan jembatan, berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku.
- b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja
- Harga Bahan Material Mangunan,
- Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi,
- Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator,
- Biaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi, Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi,
- c Jenis : ASB Konstruksi
- d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi.
- e Metode Penghitungan : - Menggunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Mempertimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca).
- Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 113 -

f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Bina Marga:

JEMBATAN

No,	NAMA KEGIATAN	SPEKIFIKASI	HARGA (Rupiah)
1	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 1 Mobilisasi Pembongkaran Jembatan Kayu Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	3,675,630
2	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 2 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran	1,800,380
3	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 3 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Penggantian Lantai Kayu Penggantian Papan Lajur Kendaraan Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran	1,394,800
4	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 4 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Papan Lajur Kendaraan Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	1,065,400



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 114 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
5	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 5 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Papan Lajur Kendaraan Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	1,105,110
6	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 6 Mobilisasi Pembongkaran Jembatan Kayu Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	3,253,560
7	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 7 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Gelegar Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Gelegar Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran	1,378,310
8	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 8 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Penggantian Sandaran Baja Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Sandaran	972,730
9	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 9 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	643,330



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 115 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
10	1M2 Jembatan Gantung	TIPE 10 Mobilisasi Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu Penggantian Lantai Kayu Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	683,040
11	1M2 Jembatan Komposit	TIPE 1 Mobilisasi Beton strukur, fc'20 MPa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pembongkaran Beton	4,852,920
12	1M2 Jembatan Komposit	TIPE 2 Mobilisasi Galian Biasa Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc'20 MPa Beton, fc'10 Mpa Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	10,162,480
13	1M2 Plat Deker	TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc'20 MPa Beton , Fc'15 Mpa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu	7,836,280
14	1M2 Box Culvert	TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Beton strukur, fc'20 MPa Beton, fc'10 Mpa Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Baja Tulangan Sirip BjTS 280 Pasangan Batu	8,950,760



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 116 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
15	1M2 Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	TIPE 1 Mobilisasi Galian Biasa Timbunan Pilihan dari sumber galian Pasangan Batu Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	2,252,280

JALAN

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
1	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 1 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Fondasi (ac-base) Laston Lapis Antara (ac-bc) LASTON LAPIS AUS (AC-WC) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Lapis Perekat - Aspal Cair 0,15 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc'15 Mpa Marka Jalan Termoplastik Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar Pasangan Batu	1,804,840
2	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 2 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston 1Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan	657,910
3	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 3 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan	458,090
4	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 4 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan	413,620



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 117 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
5	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 5 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc'15 Mpa	777,850
6	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 6 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc'15 Mpa	578,030
7	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 7 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton , fc'15 Mpa	533,560
8	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 8 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Beton , fc'15 Mpa Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	926,020
9	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 9 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Beton, fc'15 Mpa Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	726,200



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 118 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
10	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 10 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Laston Lapis Aus (ac-Wc) Tebal Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Lapis Perekat - Aspal Cair 0,15 Ltr/m2 Beton, fc'15 Mpa	716,070
11	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 11 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	668,630
12	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 12 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	468,810
13	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 13 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	424,340
14	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 14 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	727,230
15	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 15 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	527,420



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 119 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
16	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 16 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	482,950
17	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 17 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	727,900
18	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 18 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	483,310
19	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 19 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	483,610
20	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 20 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	762,280
21	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 21 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	562,460



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 120 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
22	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 22 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	517,990
23	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 23 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	578,010
24	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 24 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	822,300
25	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 25 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	622,490
26	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 26 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	517,990
27	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 27 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu	804,720



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 121 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
28	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 28 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu	604,900
29	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 29 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) 2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa Pasangan Batu	560,430
30	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 30 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas B Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	683,970
31	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 31 Timbunan Pilihan Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	484,160
32	1 M2 Pembuatan Jalan Perkerasan Lentur	TIPE 32 Fondasi Agregat Kelas A Laston Lapis Antara (ac-bc) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 1 Ltr/m2 Bahan Anti Pengelupasan Galian Biasa	439,690



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 122 -

2. ASB-002 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Cipta Karya (Bangunan Gedung),

- a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Cipta Karya merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan Bangunan Gedung, berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku.
- b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja
- Harga Bahan Material Mangunan.
- Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi.
- Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator.
- Baiaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi, Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- c Jenis : ASB Konstruksi
- d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi.
- e Metode Penghitungan : - Menggunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Mempertimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca),
- Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah.
- f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Cipta Karya:

BANGUNAN GEDUNG

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
1	1 M2 Pembangunan Gedung Sederhana	Luas Bangunan < 500 M2 ; 1 Lantai	6,057,780
2	1 M2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	Luas Bangunan > 500 M2 ; S/d 2 Lantai	7,665,120
3	1 M2 Pembangunan Rumah Type A	Luas Bangunan S/d 250 M2 ;	7,595,340
4	1 M2 Pembangunan Rumah Type B	Luas Bangunan S/d 120 M2 ;	6,123,230



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 123 -

5	1 M2 Pembangunan Rumah Type C, D, E	Luas Bangunan S/d 70 M2 ;	5,678,230
6	1 M2 Pembangunan Pagar Depan Gedung		6,019,040
7	1 M2 Pembangunan Pagar Samping Gedung		5,353,040
8	1 M2 Pembangunan Pagar Belakang Gedung		5,227,600
9	1 M2 Pembangunan Pagar Depan Rumah		5,159,120
10	1 M2 Pembangunan Pagar Samping Rumah		3,024,370
11	1 M2 Pembangunan Pagar Belakang Rumah		3,310,850

3. ASB-003 Analisis Standar Biaya Konstruksi Bidang Sumber Daya Air (Bangunan Irigasi, dan Bendungan)

- a Deskripsi : Analisis Standar Belanja Konstruksi Bidang Sumber Daya Air merupakan Analisis Standar Belanja untuk menentukan besaran biaya yang wajar dan terukur dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur air berdasarkan komponen pekerjaan, volume, dan harga satuan yang berlaku.
- b Komponen Analisis Biaya : - Upah Pekerja Sesuai Jenis dan Tingkat Kompetensi Kerja
- Harga Bahan Material Mangunan.
- Biaya Mobilisasi Tenaga Kerja dan Peralatan Konstruksi.
- Peralatan Konstruksi (Alat Berat, Alat Pembantu, Bahan Bakar dan Operator.
- Baiaya SMKK Konstruksi (Biaya Dokumen Penerapan SMKK, Sosialisasi dan Pelatihan, Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri, Asuransi, Personil Keselamatan Konstruksi, Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, Rambu dan Perlengkapan Lalulintas, Konsultasi dengan Ahli Tentang Keselamatan Konstruksi, dan Peralatan Terkait dalam Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- c Jenis : ASB Konstruksi
- d Aktifitas : Harga Satuan Konstruksi 1M2/1M1 Sesuai Dengan Jenis dan Spesifikasi Bangunan Konstruksi.
- e Metode Penghitungan : - Menggunakan Pendekatan Penghitungan Harga Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Konstruksi Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 124 -

- Mempertimbangkan Jarak Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi (aksesibilitas, kondisi tanah, cuaca).
- Mengacu pada standar nasional seperti SNI, HSPK, dan indeks harga konstruksi daerah.

f Analisis Standar Belanja (ASB) Konstruksi Bidang Sumber Daya Air:

IRIGASI

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
1	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	Bangunan Standar, Luas Bangunan < 500 M2	425,450
2	1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN	T.1,2.L.1.2	913,260
3	1 M2 PEKERJAAN REHAB BENDUNG	P.50	181,780
4	1 M2 PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS	P.130	726,030
5	1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN	T.1.L.1.	677,110
6	1 M2 PEKERJAAN REHAB BENDUNG	P.100	229,140
7	1 M2 PEKERJAAN RUMAH PELINDUNG		2,223,340
8	1 M2 PEKERJAAN REHAB RUMAH PELINDUNG		1,775,530
9	1 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10	1,292,610
10	2 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10	2,585,210
11	1 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12	1,305,240
12	1 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12	1,305,240
13	2 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12	2,610,470
14	1 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10	1,292,610
15	2 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10	2,585,210
16	1 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12	1,305,240
17	2 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12	2,610,470
18	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10	1,938,910
19	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10	1,938,910
20	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 8x10	1,938,910
21	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	3x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 8x10	1,938,910
22	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ2,7 mm Mesh 10x12	1,957,860
23	1,5 M2 BRONJONG PABRIKASI	2x1x0,5Φ3,0 mm Mesh 10x12	1,957,860
24	1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN	T.0.9.L.0.8	504,040
25	1 M2 PEKERJAAN REHAB SALURAN	T.1.L.1.	509,190



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 125 -

No,	NAMA KEGIATAN	SPESIFIKASI	HARGA (Rupiah)
26	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.1,2.L.2,50	391,960
27	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.1,5.L.0,60	457,990
28	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.1.L.1.	425,450
29	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.2.L.1.	431,190
30	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.0.8.L.0,7	393,870
31	1 M2 PEKERJAAN SALURAN	T.1.5.L.3	451,290
32	1 M2 PEKERJAAN BOX BAGI	P.6.96.L.3	1,132,810
33	1 M2 PEKERJAAN TERJUNAN	T.1.2.L.1.2	1,654,510
34	1 M2 PEKERJAAN PENGURAS	T.0.9.L.1.2	1,132,810

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002